

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING XV-1



22 FEB 2008

0800486

PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA LOKAL (ADAT) DALAM MENDUKUNG PEMANFAATAN POTENSI PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN TRENGGALEK

Dr. Ir. AGUS TJAHJONO, MS
Dr. KHUSNUL ASHAR, SE MA
Ir. EDI SUSILO, MS
SITI KHOLIFAH, S.Sos, MSi

Dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan
Penelitian Desentralisasi Nomor : 017/SP2H/PP/DP2M/III/2007
Direktort Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOPEMBER, 2007

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING XV-1

1. Judul Penelitian : PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA LOKAL (ADAT) DALAM Mendukung Pemanfaatan Potensi Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Trenggalek

2. Ketua Peneliti :

- a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Ir. AGUS TJAHJONO, MS
 b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 c. NIP : 131 759 603
 d. Jabatan Fungsional : Lektor
 e. Jabatan Struktural : Sekretaris Program Ilmu Sosial
 f. Bidang Keahlian : Manajemen Usaha/Kewirausahaan
 g. Fakultas/Jurusan : Perikanan/MSP
 h. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
 i. Tim Peneliti :

No.	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	FAKULTAS/JURUSAN	PERGURUAN TINGGI
1.	Dr. Khusnul Azhar, SE, MM	Ekonomi Keuangan Mikro	Fakultas Ekonomi/ISP	Univ. Brawijaya
2.	Ir. Edi Susilo, MS	Model Kelembagaan	Fakultas perikanan/MSP	Univ. Brawijaya
3.	Siti Kholifah, S.Sos, MSi	Pemberdayaan Perempuan	Program Ilmu Sosial/Sosiologi	Univ. Brawijaya

3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian :

- a. Jangka Waktu Penelitian : 2 Tahun
 b. Biaya Total yang diusulkan : Rp. 99.985.250,-
 c. Biaya yang disetujui tahun 2007 : Rp. 27.500.000

Mengetahui
 Dekan
 Fakultas Perikanan

Ir. SUKOSO, MSc. Ph.D
 NIP. 131 857 373

Malang, 31 Oktober 2007
 Ketua Peneliti,

Dr. Ir. AGUS TJAHJONO, MS
 NIP. 131 759 603

Menyetujui,
 an-Ketua Lembaga Penelitian
 Universitas Brawijaya
 Sekretaris

Prof. Dr. Ir. SITI CHUZAEMI, MS.
 NIP. 130 809 321

RINGKASAN

Agus Tjahjono, dkk Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Keuangan Mikro Dan Lembaga Lokal (Adat) Dalam Mendukung Pemanfaatan Potensi Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Trenggalek

Salah satu faktor yang belum dapat diatasi dengan efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai pelaku ekonomi adalah penyediaan kebutuhan modal usaha guna mendukung upaya pengembangan usaha dan investasi yang cepat dan mudah diperoleh. Hal ini dikarenakan sistem perkreditan yang ada pada perbankan mengacu pada agunan yang dijadikan dasar pengurangan resiko. Selain itu sistem pembayaran angsuran kredit perbankan menggunakan sistem flat dimana pembayaran angsuran ditetapkan dalam jumlah sama per periode (per bulan). Hal ini mungkin cocok untuk perusahaan yang penerimaan usahanya rutin, berbeda dengan kondisi masyarakat pesisir yang penerimaan usahanya sangat tergantung dari musim. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan agar diketahui bagaimana model lembaga ekonomi-keuangan rasional yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat (lokal), sehingga kekhawatiran adanya kredit macet dapat diminimalkan dan dapat menunjang pembangunan masyarakat pesisir melalui penyediaan modal yang sesuai.

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah tercapainya pengembangan usaha dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya masyarakat pesisir) melalui pemanfaatan sumberdaya yang rasional, optimal dan berkelanjutan. Target khusus penelitian ini adalah: (1) Mendiskripsikan profil masyarakat perikanan dan identifikasi kegiatan usaha ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, dan kontribusinya dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Mendiskripsikan profil kelembagaan ekonomi-keuangan mikro dan kelembagaan masyarakat lokal yang relevan dengan pembangunan masyarakat pesisir.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan data survei. Pada tahun pertama, dianalisis mengenai profil masyarakat dan kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada, dan profil kelembagaan ekonomi-keuangan mikro dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa :

- (1) Kawasan pesisir Pantai Prigi telah mengalami berbagai perubahan. Berbagai perubahan usaha penangkapan ikan berkembang sesuai dengan kondisi perubahan sumberdaya, maupun kemampuan teknologi yang dikuasai oleh nelayan, terutama untuk mengakses sumberdaya di lepas pantai dengan penggunaan alat bantu rumpon laut dalam. Selain sebagai nelayan masyarakat pesisir berusaha dibidang pengolahan, dan perdagangan yang relatif tidak mengalami perubahan dalam usaha.
- (2) Perubahan sasaran usaha penangkapan ikan mengarah kepada jenis-jenis ikan ekonomis penting yang berorientasi ekspor, seperti ikan tuna dan layur, telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor ini. Peran usaha perikanan terhadap PAD mengalami peningkatan yang signifikan pada 5 tahun terakhir yaitu sekitar Rp.100.000.000 pada tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 310.000.000 pada tahun 2006

- (3) Kelembagaan ekonomi keuangan yang ada mengalami pertumbuhan, terutama dikembangkannya kelembagaan baik melalui program pemerintah, maupun atas inisiatif masyarakat itu sendiri.
- (4) Model pengembangan kelembagaan ekonomi dan keuangan didasarkan pada temuan model yang diduga dapat lebih memberdayakan akses permodalan nelayan melalui pembayaran proporsional sesuai musim ikan.

Saran dari penelitian ini adalah diperlukannya sebuah riset aksi untuk membentuk kelembagaan ekonomi keuangan mikro "baru" yang lebih operasional dan mampu meningkatkan aksesibilitasnya terhadap perbankan di satu sisi, dan di sisi lain mampu meningkatkan aksesibilitas nelayan di dalam memenuhi kebutuhan permodalan dalam menjalankan usahanya.



PRAKATA

Segala puji kepada Allah SWT yang Menguasai alam semesta karena atas ridho, rahmat dan hidayah-Nya semata, kegiatan penelitian tahun I ini dapat diselesaikan. Penelitian ini akan diselesaikan dalam dua tahap kegiatan dengan harapan diketemukan model pemberdayaan kelembagaan terutama lembaga ekonomi-keuangan mikro dalam mendukung pengembangan usaha perikanan khususnya dipesisir Prigi Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu besar harapan kami agar kegiatan penelitian tahap II dapat kami selenggarakan.

Atas selesainya laporan ini, sangat layak diucapkan terima kasih kepada :

1. Ditjen Dikti atas bantuan dana yang diberikan sehingga penelitian ini bisa terlaksana
 2. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya atas kepercayaan, fasilitas, dan pengarahannya sehingga penelitian ini bisa terlaksana
 3. Dinas perikanan dan Pelabuhan Kabupaten Trenggalek
 4. Kepala TPI Bapak Sukanto yang begitu antusias mendukung dan memberikan masukan dalam penelitian ini
 5. Semua pihak yang telah membantu dimana tidak bisa kami sebutkan satu persatu
- Kami berharap semoga karya tulis ini bermanfaat, kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi kesempurnaan penulisan laporan ini.

Malang, 31 Oktober 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN DAN SUMMARY	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 4
2.1 Sumberdaya Alam dan Wilayah Pesisir	4
2.2 Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir	7
2.3 Lembaga Ekonomi Keuangan Mikro	8
2.4 Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir	9
 III. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN	 11
3.1. Tujuan Penelitian	11
3.2. Manfaat Penelitian	12
 IV. METODE PENELITIAN	 13
3.1 Kerangka Pemikiran	13
3.2 Pendekatan Studi	14
3.3 Metode Analisis Penelitian	15
 V. HASIL DAN PEMBAHASAN	 18
5.1 Kondisi Fisik Kawasan	18
5.1.1 Sumberdaya Habitat	18
5.1.2 Kualitas air	19
5.1.3 Sumberdaya Ikan	20
5.1.4 Armada Perikanan dan Alat Tangkap	20
5.1.5 Daerah dan Hasil Penangkapan	21
5.2 Kondisi Sosi-budaya Kawasan	22
5.2.1 Kependudukan	22
5.2.2 Prasarana dan Ekonomi	22
5.2.3 Sosio-budaya	23
5.2.4 hukum dan Kesadaran Lingkungan	23
5.3 Kawasan Prigi Saat ini	24
5.3.1 Kondisi Fisik Kawasan Pesisir	24
5.3.2 perubahan sistem penangkapan Ikan	25

5.4	Usaha Perikanan dan Kontribusinya Terhadap PAD	26
5.4.1	Gambaran Umum Usaha Perikanan	26
5.4.2	Tenaga Kerja	29
5.4.3	Kontribusi Usaha Perikanan Terhadap PAD	29
5.5	Profil Kelembagaan Ekonomi-keuangan Masyarakat Pesisir	30
5.5.1	Perkembangan Secara Umum	30
5.5.2	profil Kelembagaan keuangan Mikro	31
5.6	Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	37
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	41
6.1	Kesimpulan.....	41
6.2	Saran.....	41
	DAFTAR PUSTAKA	42
	LAMPIRAN	44



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
5.1. Komposisi Nelayan di PPN Prigi pada Tahun 2006	27
5.2. Jenis dan Jumlah Ikan yang Didaratkan di PPN Prigi Tahun 2006	28
5.3. Kontribusi Usaha Perikanan Terhadap PAD dari TPI Prigi	30
5.4. Performance Lembaga Keuangan Perseorangan yang berkaitan dengan "kredit" Rumpun Laut Dalam	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Langkah-langkah Kegiatan penelitian	17
5.1. Model Umum Kelembagaan Akomodatif	37
5.2. Model Operasional Kelembagaan Akomodatif.....	38
5.3. Model BPR (Jaringan Kerjasama antar Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir)....	38
5.4. Model jejaring pemberdayaan kelembagaan ekonomi keuangan mikro	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Trenggalek	44
2. Peta Desa Prigi	45
3. Peta Desa Tasikmadu.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar mengakibatkan tekanan penggunaan tanah terutama tanah untuk kegiatan pertanian semakin berat dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan. Oleh karena itu salah satu alternatif yang memungkinkan adalah mengandalkan kawasan pesisir sebagai sentra kegiatan usaha dibidang perikanan guna mencukupi kebutuhan pangan tersebut.

Kawasan pesisir di Indonesia menjadi bagian penting dari kegiatan pembangunan dan perekonomian, mengingat sekitar 80 % dari seluruh kegiatan terkait dengan sektor kelautan dan perikanan berada di kawasan ini, apalagi dengan menipisnya sumberdaya yang ada didarat. Diperkirakan pula bahwa sekitar 60 % penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir, sebagian besar mereka tergantung pada sumberdaya lokal yang sersedia. Keadaan ini menandakan bahwa kawasan pesisir dan sumber-sumbernya sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan penduduk Indonesia. Bahkan seperti diperkirakan oleh Dahuri (1993, 1995, 1997, 2002); Dahuri et.al (1996) bahwa dengan adanya kecenderungan sumberdaya daratan yang semakin langka, target dasar pembangunan ekonomi Indonesia yang akan datang akan bertumpu pada zona pantai dan sumber-sumbernya.

Studi ini menjadi penting karena diharapkan akan dapat meningkatkan peran masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada, baik itu lembaga ekonomi-keuangan mikro ataupun lembaga kemasyarakatan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan usaha dalam memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan. Hal ini juga relevan dalam kerangka mengaktualisasikan kewenangan dan otonomi daerah dibidang pengelolaan wilayah pesisir, sebagaimana diatur dalam UU No.22 th.1999 tentang Pemerintah Daerah, serta mengantisipasi perimbangan keuangan daerah dari hasil pemanfaatan sumberdaya kelautan sesuai dengan UU No.25 th.1999.

Disamping itu pada era reformasi dan demokrasi ini pemerintah harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam menentukan bagaimana nantinya pembangunan tersebut, sehingga proyek-proyek pembangunan akan banyak dibantu, dipelihara dan didukung oleh rakyat karena masyarakatlah yang merencanakan sesuai dengan kebutuhannya.

Sejak jaman dahulu kala, kawasan pesisir merupakan kawasan kegiatan usaha perekonomian terbesar dari penduduk serta sebagai tempat pemukiman utama. Disamping itu terdapat indikasi bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan tumpang tindih kepentingan dan sering dijumpai adanya permintaan akan lahan yang didasarkan semata-mata kepentingan tertentu, yang secara spesifik berorientasi kepada kepentingan masing-masing sektor dan sering merupakan pemanfaatan eksklusif.

Kondisi yang ada sering mengabaikan potensi untuk menciptakan bentuk pengembangan yang bersifat pemanfaatan ganda yang dapat saling melengkapi, dan sedikit sekali perhatian yang diberikan untuk kemungkinan bagi pengembangan yang terintegrasi dengan sektor lain. Sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan menjadi terganggu dan tidak optimal.

Di samping itu masyarakat di kawasan pesisir pada umumnya syarat dengan berbagai macam keterbatasan, antara lain pengetahuan, teknologi, modal, dan ketrampilan. Kelembagaan ekonomi dan keuangan mikro merupakan faktor eksternal yang sangat esensial dalam pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Apabila faktor sumberdaya dan kelembagaan ini tidak diperhatikan, maka investasi dalam pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan diduga bukan saja tidak efektif dan efisien dalam mencapai sasaran yang diinginkan, bahkan akan dapat juga menyebabkan masalah dalam keberlanjutan usaha. Sementara itu potensi sumberdaya perikanan yang dihadapi membentang luas dan menjanjikan untuk dapat memberikan tingkat pendapatan yang tinggi.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan pada penelitian tentang identifikasi keperluan usaha ekonomi di Kabupaten Trenggalek (Tjahjono, dkk, 1998) dan *Socio-Economic Assessment* (SEA) II di Kabupaten Trenggalek (Tjahjono, dkk, 2004) diketahui bahwa masyarakat pesisir pantai prigi dan sekitarnya pada dasarnya sudah melaksanakan kegiatan usaha sesuai bidang usahanya dan masih berharap adanya alternative usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ada keinginan meningkatkan usahanya dengan menambah modal usaha akan tetapi belum banyak yang mampu mengakses sumber dana dari bank, sehingga lebih cenderung mengakses modal dari pengambe' (pelepas utang; pengijon di pertanian). Sistem perbankan yang dasar pemikirannya berorientasi pada sistem perusahaan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat pesisir. Lembaga kemasyarakatan lokal telah dirintis keberadaannya akan tetapi masih diperlukan peningkatan peran lembaga tersebut. Berdasarkan penemuan riset-riset tersebutlah ide dasar penelitian ini direncanakan dengan target utama meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pesisir melalui peningkatan peran lembaga ekonomi-keuangan dan lembaga kemasyarakatan lokal. Hal ini perlu karena sumberdaya lokal akan meningkat pemanfaatannya bila dikelola secara lebih baik.

Pembangunan ekonomi nasional dalam prosesnya diperlukan peningkatan dari peran aktif dan hasil kegiatan yang dilakukan dapat dimanfaatkan oleh sebagian besar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi (usaha kecil-menengah) berhak untuk memperoleh dukungan dan prioritas agar nantinya bukan saja mampu berkembang lebih sejahtera, namun juga dapat memberikan sumbangan lebih konkrit dan menentukan. Hal ini perlu diperhatikan karena terbukti pelaku ekonomi ini telah mampu menahan gelombang dampak krisis ekonomi yang berlangsung, sementara usaha besar yang berbasis teknologi tinggi banyak yang mengalami kebangkrutan.

1.2. Perumusan Masalah

Bila dilihat kajian di atas, maka salah satu faktor yang belum dapat diatasi dengan efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai pelaku ekonomi adalah penyediaan kebutuhan modal usaha guna mendukung upaya pengembangan usaha dan investasi yang cepat dan mudah diperoleh. Hal ini seakan dibenarkan karena sistem perkreditan yang ada pada perbankan mengacu pada anggapan dimana kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Seringkali agunan dijadikan dasar pengurangan resiko tersebut. Selain itu sistem pembayaran angsuran kredit perbankan untuk wilayah pesisir juga menggunakan sistem flat dimana pembayaran angsuran ditetapkan dalam jumlah sama per periode (per bulan). Hal ini mungkin cocok untuk perusahaan yang penerimaan usahanya rutin, berbeda dengan kondisi masyarakat pesisir yang penerimaan usahanya sangat tergantung dari musim. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan agar diketahui bagaimana model lembaga ekonomi-keuangan rasional yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat (lokal), sehingga kekhawatiran adanya kredit macet dapat diminimalkan dan dapat menunjang pembangunan masyarakat pesisir melalui penyediaan modal yang sesuai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sumberdaya Alam dan Wilayah Pesisir

Sumber daya menurut Fauzi, (2004) adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Menurut Rees dalam Fauzi, (2004), sesuatu dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria, yaitu :

- (1) Pengetahuan, teknologi atau ketrampilan (*skill*) untuk memanfaatkannya,
- (2) Permintaan terhadap sumber daya tersebut.

Dengan demikian dalam pengertian ini definisi sumber daya terkait dengan kegunaan (*usefulness*). Selain dua kriteria di atas, definisi sumber daya juga terkait dua aspek, yaitu ;

- a. Aspek teknis, yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan
- b. Aspek kelembagaan, yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya

Pengertian sumber daya pada dasarnya mencakup aspek yang jauh lebih luas. Dalam literatur sering dinyatakan bahwa sumber daya memiliki nilai "*intrinsic*". Nilai *intrinsic* adalah nilai yang terkandung dalam sumber daya, terlepas apakah sumber daya tersebut dikonsumsi atau tidak, atau lebih ekstrem lagi, terlepas dari apakah manusia ada atau tidak (Fauzi, 2004).

Dalam pembatasan sumber daya pada sumber daya alam, maka sumber daya alam dapat diartikan sebagai segala sumber daya hayati dan non-hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Dengan kata lain, sumber daya alam adalah faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi (Fauzi, 2004).

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri, *et al*, 1996; Bengen, 2004). Dengan kata lain wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena

kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2004; Supriharyono, 2000).

Sebagaimana diketahui, kawasan pesisir tersusun dari berbagai macam ekosistem yang dicirikan oleh sifat dan proses biotik yang jelas, satu sama lain tidak berdiri sendiri bahkan saling terkait (Nybaken 1982; Dahuri 1995,1997). Dinyatakan Dahuri et al, (1996) kawasan pesisir ini memiliki kekhususan karena dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia dan proses alamiah yang terdapat dilahan atas (*upland areas*) maupun laut lepas (*oceans*). Berdasarkan fungsi utamanya, kawasan ini meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, berdasarkan kegiatan utamanya meliputi kawasan pedesaan yang berkegiatan di bidang pertanian termasuk perikanan.

Pengelolaan sumberdaya alam di kawasan pesisir pada hakekatnya menghendaki bagaimana mengelola sumberdaya alam di kawasan tersebut yang sesuai (*compatible*) dengan ekosistemnya ke arah pencapaian peningkatan produktivitas yang dapat menyumbang sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta memperhitungkan aspek distribusi pendapatan yang lebih baik, seperti yang dijelaskan Harahap (1993, 1998); Harahap, dkk (2000) bahwa distribusi pendapatan usaha penangkapan ikan perlu dilakukan penyeimbangan melalui lembaga ekonomi yang ada dan berkembang di masyarakat. Pembangunan kawasan ini juga mensyaratkan agar dampaknya tidak mengakibatkan biaya eksternalitas (*external social cost*) kepada subsistem lain di luar ekosistem kawasan tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, hal ini dijadikan aspek penting untuk diperhitungkan dalam setiap keputusan yang menyangkut program dan proyek pengembangan di kawasan pesisir. Dalam hal ini, kualifikasi dampak pengaruh ganda ("impact multiplier") perlu dianalisa dan diperhitungkan sebagai bahan pertimbangan pemikiran tentang siapa yang diuntungkan di dalam suatu pembangunan dan siapa yang harus menanggung bebannya.

Masalah di atas sebenarnya berkaitan dengan upaya menemukan cara-cara menangkap dampak multiplier oleh masyarakat lokal wilayah yang bersangkutan. Hal ini akan berkaitan dengan pemberdayaan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasikan kelembagaan suatu wilayah secara efektif agar dapat mengurangi akibat sampingan negatif dari pembangunan tersebut. Bila upaya ini tidak mampu diangkat ke permukaan, maka dikawatirkan bahwa pengelolaan sumberdaya di kawasan pesisir hanya akan lebih merupakan eksploitasi terhadap sumberdaya alam. Sedangkan masyarakat di kawasan pesisir tidak mempunyai kemampuan untuk menangkap manfaat yang dapat dihasilkan oleh pembangunan tersebut. Sehingga pada gilirannya terjadi "kebocoran" manfaat

wilayah yang biasanya akan diikuti oleh mengalirnya sumberdaya tenaga kerja produktif yang tidak dapat diikutsertakan dalam proyek pembangunan tersebut ke luar kawasan yang bersangkutan.

Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa kebocoran wilayah sering terjadi sebagai akibat penembangan proyek yang menghasilkan komoditi komersial, terutama yang berteknologi tinggi (bukan subsisten) dalam kawasan yang masyarakatnya belum mencapai kemajuan ekonomi yang berarti. Sebagai akibatnya, manfaat tersebut sering ditangkap bukan secara lokal melainkan oleh wilayah luar. Bila hal ini terjadi lagi, maka dampak lanjutan yang ditimbulkan akan sangat mengkhawatirkan, terutama dalam kaitannya dengan masalah sosial yang ditimbulkan oleh kerusakan sumberdaya alam dan terancamnya keamanan.

Usaha penangkapan ikan pada dasarnya mengelola sumber ikan yang merupakan milik bersama. Akibat ciri kepemilikan tersebut, maka fungsi produksi pada usaha penangkapan ikan ditujukan sebagai hubungan antara penangkapan secara total (sebagai output) dan tingkat upaya penangkapan ikan (sebagai input) pada periode musim atau tahun tertentu (Smith, 1975).

Pengertian upaya penangkapan adalah indeks tertentu mencakup jumlah kapal, tenaga dan hari kerja penangkapan ikan periode tertentu. Mengingat jumlah stok ikan di perairan dibatasi oleh daya dukung sumber alami tertentu, maka fungsi produksi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk huruf U terbalik. Pada tahap awal, perkembangan usaha penangkapan ikan menaik dan produksi ikan secara total juga meningkat. Namun setelah mencapai puncak produksi, maka produksi ikan secara total menurun sekalipun jumlah kapal penangkapan ikan meningkat pula. Dengan demikian fungsi produksi pada usaha penangkapan ikan dibatasi oleh hukum kenaikan yang makin berkurang (Gulland, 1983).

Pembangunan dan manajemen dalam usaha penangkapan ikan secara bersama sama dapat dilakukan untuk mencapai tingkat eksploitasi optimum dari usaha penangkapan ikan disuatu perairan tertentu (Panayotou, 1982).

Usaha pembangunan suatu wilayah memerlukan tiga faktor utama yang sangat diperlukan, yaitu sumberdaya manusia, alam, dan modal (Siagian, 1986). Sumberdaya manusia merupakan yang terpenting karena manusia sekaligus sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan tersebut, sehingga setiap usaha pembangunan baru dapat dihasilkan jika usaha itu ditampilkan sebagai gerakan pembangunan yang luas dan melibatkan seluruh rakyat dengan titik berat pada memanfaatkan semangat, gairah, kecerdasan dan tenaga.

2.2. Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir

Sumberdaya dominan di desa-desa pantai (Kabupaten Trenggalek terutama Prigi) adalah perikanan laut, kehutanan dan pariwisata. Menurut Tjahjono, dkk (1999), berdasarkan hasil studi SEA-REA I terdapat empat permasalahan sumberdaya yang berhasil diidentifikasi yaitu: (a) permasalahan sumberdaya ikan (SDI) (multi spesies, multi alat dan musiman), (b) permasalahan sumberdaya habitat (SDH) (kerusakan mangrove dan terumbu karang), (c) permasalahan sumberdaya lingkungan (SDL) (erosi, daerah terbuka dan konflik kepentingan), dan (d) permasalahan manajemen (ancaman pada regenerasi dan tumpang tindih jalur operasi penangkapan). Keempat permasalahan tersebut saling terkait, sehingga diperlukan suatu model pengelolaan yang menjamin adanya pengguna sumberdaya yang bertanggung jawab.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, terdapat pula permasalahan yang berkaitan dengan sosial-ekonomi masyarakat, yaitu: (a) masalah sosial: (1) adanya konflik dengan nelayan andhon dalam hal penggunaan potas, pencurian jaring, perbedaan budaya, dan kemajuan teknologi; (2) konflik antara nelayan jaring tarik dengan nelayan purse seine dan nelayan payang; (3) konflik nelayan lokal dengan pengelola pariwisata; (4) konflik antara nelayan andhon dengan pengelola pariwisata; serta (5) tingkat kepekaan/kepedulian pada lingkungan cukup rendah; (b) masalah ekonomi, yaitu pendapatan pekerja jaring tarik dan pekerja pengolahan serta petani penggopla relatif rendah.

Sistem pengelolaan sumberdaya perikanan di Prigi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang disebut *Interaksi Tiga Roda*. Pendekatan tersebut adalah: (a) pendekatan sumberdaya; (b) pendekatan pengguna sumberdaya; dan (c) pendekatan melalui kebijakan penggunaan sumberdaya. Pengguna sumberdaya mencakup kondisi demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan dinamika interaksi masyarakat perikanan (inti) dengan masyarakat lainnya di daerah pantai.

Tjahjono, dkk (2004) dalam kajian SEA II ini pembahasannya berkaitan dengan pengguna sumberdaya atau obyek yang memanfaatkan sumberdaya yang ada, guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dalam pemanfaatan sumberdaya maupun permasalahan sosial ekonomi, termasuk konflik yang terjadi antar pengguna dan proses penyelesaian potensi konflik atas konflik yang timbul. Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dalam pemanfaatan sumberdaya maupun permasalahan sosial ekonomi, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam

melakukan manajemen pengelolaan sumberdaya. Oleh karena itulah telah dibentuk PSBK pada studi sebelumnya, dengan tujuan pelibatan peran aktif masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada serta memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan sumberdaya secara bersama.

Pembentukan PSBK dilakukan untuk melaksanakan kerangka kerja yang telah disusun dalam Perencanaan Manajemen Perikanan. Pola pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas yang ada di Indonesia dapat disebut sebagai model PSBK atau *Territorial User Right of Fisheries* (TURF). TURF yang ada di Prigi merupakan cikal bakal terbentuknya PSBK, dimana TURF memiliki ruang gerak yang relatif lebih sempit. Sedangkan PSBK memiliki cakupan yang lebih luas dengan wilayah operasional dalam satuan ekologis (bukan administratif), dan melibatkan sebanyak mungkin stakeholder potensial.

Kelompok PSBK yang telah dibentuk perlu diberikan bekal yang cukup tentang bagaimana mengelola PSBK dengan baik, menyusun mekanisme kerja organisasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan pengelolaan sumberdaya yang timbul. Untuk itu perlu diberikan pendampingan-pendampingan dan pelatihan kepada pengurus maupun anggota PSBK. Pendampingan yang diperlukan diantaranya pendampingan ekonomi, pendampingan keanekaragaman hayati, pendampingan *community development*, pendampingan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai partisipatif, pendampingan manajemen usaha, dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan juga diperlukan untuk meningkatkan ketrampilan kelompok dalam meningkatkan pendapatan melalui perbaikan usaha sesuai dengan jenis usaha yang digeluti.

2.3. Lembaga Ekonomi Keuangan Mikro

Lembaga ekonomi yang ada di masyarakat pesisir (Prigi) pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dan Lembaga Usaha Masyarakat (LUM) (Tjahjono, dkk, 2004). Lembaga-lembaga yang tumbuh di masyarakat tersebut telah dirintis sejak adanya proyek co-fish, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan (tindak lanjut) dari keberadaan lembaga tersebut dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang ada.

Lembaga ekonomi tersebut diatas pada dasarnya dapat ditingkatkan perannya bila didukung oleh keberadaan modal usaha yang sesuai dengan keperluan sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik, oleh karena itu diperlukan peran pendukung permodalan

yang ada di daerah tersebut. Lembaga keuangan atau perkreditan yang ada di daerah pesisir (prigi) dan dikenal oleh masyarakat antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Prigi, Bank NUSUMMA unit Bandung, dan BCA di Trenggalek. Selain bank yang menyediakan kredit kepada masyarakat, pengambe' lebih dikenal oleh masyarakat nelayan sebagai sumber peminjaman uang, disamping koperasi nelayan.

Sumber keuangan dari bank diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam penyaluran kreditnya, akan tetapi kredit dari bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat (pasal 8 Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 dalam Anonymous, 1998). Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.. Agar resiko berkurang (tidak terjadi kredit macet) maka dirasa perlu diteliti model penyaluran kredit dan sistem pembayarannya, disesuaikan dengan kondisi usaha yang ada pada masyarakat setempat.

2.4. Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir menurut Tjahjono, dkk (2004) berdasarkan kelompok usahanya dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: (a) masyarakat perikanan, terdiri dari: nelayan pemilik, pengolah, pedagang, dan pekerja; (b) masyarakat interaksi langsung, terdiri dari: ojek laut, becak manol, pengasag, agen es balok, montir kapal, warung nasi, dan toko saprodi; (c) masyarakat interaksi tidak langsung, terdiri dari: angkutan kota, wartel, dan toko kelontong; (d) masyarakat non perikanan, terdiri dari: pertanian, peternakan, pegawai negeri, dan ABRI.

Usaha penangkapan ikan di laut sama dengan usaha berburu. Prosesnya bersifat ekstraktif, yaitu mengambil hasil dari alam tanpa usaha untuk mengembalikan hasil tersebut untuk pengambilan di kemudian hari. Dalam usaha perikanan, modal dan tenaga kerja yang trampil memegang peranan penting dalam suatu proses produksi. Keterampilan sebagai nelayan bersifat sederhana dan hampir sepenuhnya dipelajari dari orang tua mereka sejak dini Purwanti (1996); Qoid (1996); dan Riniwati (1995, 1998). Susrini dkk (1997) menyatakan bahwa sebagian besar pendidikan kenelayanan diperoleh dari belajar sendiri (dari teman, kerabat, dsb) dan turun temurun, masing-masing 45,46% dan 36,36%.

Sebagian besar masyarakat pesisir (nelayan) tidak dapat melepaskan diri dari profesinya sebagai nelayan. Pekerjaan sampingan yang dapat menghasilkan uang pada

musim paceklik tidak dapat (sulit) dilakukan oleh para nelayan. Hal itu bukan hanya dikarenakan oleh lingkungan alam yang tidak memungkinkan, tetapi lebih disebabkan oleh tidak adanya keahlian selain menangkap ikan. Menurut Ashar, et al(1995) fenomena kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan sosial, ekonomi dan politik. Selanjutnya dikemukakan bahwa kendala-kendala dalam faktor ekonomi adalah : (1) perekonomian wilayah yang masih terbatas pada sektor primer, (2) Penguasaan modal dan teknologi yang terbatas sehingga produktivitas tenaga kerjanya rendah, (3) keunggulan kompetitif komoditi yang dapat dipasarkan keluar daerah sangat terbatas, (4) Prasarana perekonomian yang terbatas, dan (5) selain itu Wahyuningsih, 1995 menemukan dalam penelitiannya bahwa petani kecil termasuk wanitanya, karena berbagai keterbatasan (pendidikan, modal, IPTEK, dll) tidak memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) dengan pemegang kekuasaan/monopoli dari seseorang/sekelompok pemodal besar (juragan), sehingga pendapatan kerja mereka tetap rendah meskipun telah secara bersama-sama berusaha mengakhiri monopoli ternyata tidak berhasil, bahkan mereka menjadi makin melarat karena harus menanggung kerugian yang sangat besar.

Semakin lancarnya transportasi antar pedesaan dapat memperkecil kendala prasarana, namun empat kendala yang lain perlu lebih mendapatkan perhatian untuk mengembangkan perekonomian desa. Kendala-kendala tersebut rupanya juga saling berhubungan satu sama lain. Perekonomian wilayah desa pantai, misalnya, pada umumnya masih terbatas pada sektor primer, yaitu mengandalkan ikan segar saja, antara lain dikarenakan oleh rendahnya penguasaan modal dan teknologi untuk pengolahan. Sebagai akibatnya, nelayan tidak dapat berkompetisi dengan daerah lain yang permodalannya lebih kuat disertai teknologi yang sudah maju.

Permodalan yang kecil selalu menjadi kendala utama dalam agribisnis. Lembaga sosial yang dibentuk untuk tujuan usaha bersama, pembentukan KUD, dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun demikian upaya termaksud seringkali mengalami kegagalan, antara lain karena lemahnya pengetahuan dan keterampilan manajemen serta adanya fenomena sosial yang potensial sebagai sumber konflik (Susilo,1997). Dengan demikian perlu dipertimbangkan bentuk lembaga sosial yang sesuai untuk mengembangkan agribisnis setempat, mungkin dengan memperbaiki sistem kelembagaan yang sudah ada atau membentuk lembaga baru yang lebih operasional.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diuraikan secara bertahap sesuai dengan tahapan penelitian selama dua tahun. Tujuan pertama dan kedua, akan dicapai pada kegiatan penelitian tahun pertama, tujuan ketiga, keempat, kelima dan keenam akan dicapai pada kegiatan penelitian tahun kedua. Rincian tahapan tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

3.1.1. Tujuan Penelitian Tahun Pertama

- (1) Mendiskripsikan profil masyarakat perikanan dan identifikasi kegiatan usaha ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, dan kontribusinya dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Mendiskripsikan profil kelembagaan ekonomi-keuangan mikro dan kelembagaan masyarakat lokal yang relevan dengan pembangunan masyarakat pesisir.

3.1.2. Tujuan Penelitian Tahun Kedua.

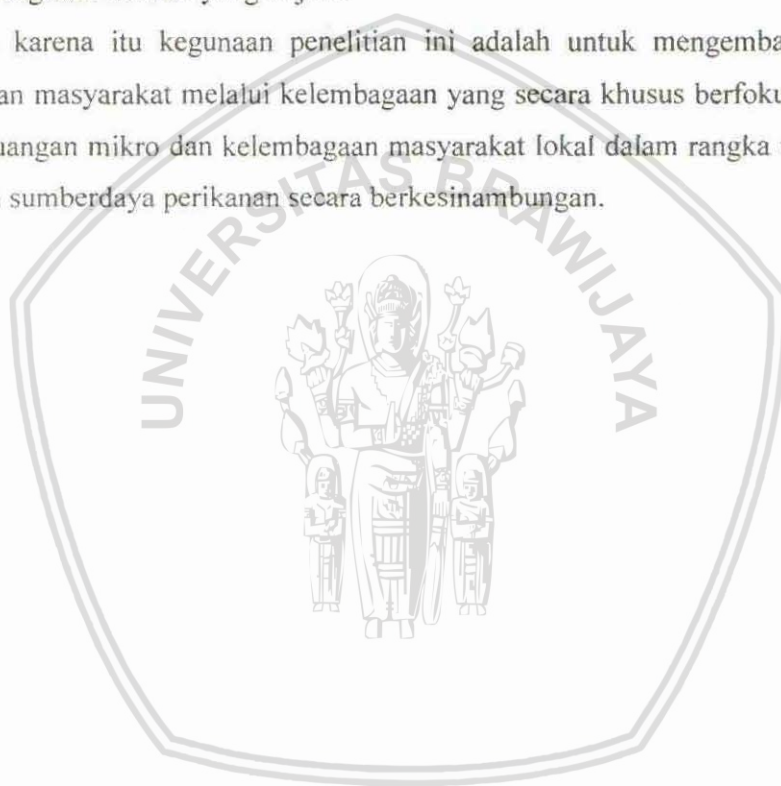
- (1) Menganalisis struktur model pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kelembagaan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkesinambungan.
- (2) Mengupayakan perbaikan produktivitas sistem agribisnis perikanan melalui pelatihan perencanaan dan pengembangan modal usaha dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan
- (3) Mendiskripsikan profil perkembangan usaha kecil menengah sebagai dampak perubahan pembangunan perikanan di kawasan pesisir.
- (4) Menemukan model ekonomi keuangan mikro dan kelembagaan masyarakat lokal yang sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir.

3.2. Manfaat Penelitian

Masyarakat pesisir telah melaksanakan kegiatan usaha ekonomi, dan ada kecenderungan menyesuaikan kegiatan usaha tersebut dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada. Untuk itu diperlukan kegiatan identifikasi kegiatan usaha apa saja yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sehingga dapat diketahui bagaimana kemungkinan pengembangannya untuk peningkatan kesejahteraannya melalui peningkatan pendapatan.

Dalam kerangka pengembangan kegiatan usaha ekonomi tersebut diperlukan adanya peran lembaga ekonomi-keuangan mikro sebagai pendukung permodalan-keuangan dan lembaga masyarakat lokal dalam peranannya sebagai lembaga pendukung perkembangan usaha dan mengatasi konflik yang terjadi.

Oleh karena itu kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan yang secara khusus berfokus pada model ekonomi keuangan mikro dan kelembagaan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkesinambungan.



Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan teknik pendekatan pengambilan data melalui survei, observasi maupun dokumenter.

4.1. Kerangka Pemikiran

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak lepas dari campurtangan manusia di dalamnya. Sumberdaya perikanan termasuk sumberdaya yang dapat pulih, tetapi dibatasi oleh faktor pembatas alami dan faktor pembatas non alami. Keterbatasan yang disebabkan oleh faktor alami akan dapat dinetralisir oleh sistem alam, sehingga populasinyapun selalu dalam keadaan seimbang. Tetapi dengan adanya intervensi manusia (misalnya penangkapan), maka keseimbangan alami akan terganggu, karena laju intervensi manusia lebih besar dari laju pertumbuhan populasi untuk memulihkan dirinya. Apabila hal ini dibiarkan tanpa kendali, maka secara biologi sumberdaya ikan akan terkuras. Secara ekonomi akan menyebabkan terjadinya inefisiensi ekonomi, karena peningkatan biaya eksploitasi tidak diiringi dengan marjinal produk yang selalu positif, sehingga pada suatu saat akan tercapai titik keseimbangan dimana total penerimaan sama dengan total biaya.

Diperlukan pengelolaan dengan baik dalam pemanfaatan sumberdaya ikan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan populasi yang ada walaupun stok ikan merupakan sumberdaya alam yang dapat pulih (*renewable resources*). Untuk itu diperlukan upaya pengelolaan pemanfaatan sumberdaya dengan konsep *sustainable*, yaitu eksploitasi sumberdaya perikanan dengan alat tangkap ramah lingkungan dan memperhatikan tingkat upaya penangkapan lestari (MSY). Konsep MSY didasarkan atas model pertumbuhan biologis, pada setiap tingkat populasi tertentu.

Suparmoko (1995) mengemukakan asumsi yang dianut dalam sumberdaya alam pulih adalah bahwa pertumbuhan merupakan fungsi sederhana dari besarnya persediaan (stok) sumberdaya alam. Tingkat pertumbuhan mula-mula meningkat dengan berkembangnya persediaan, namun kemudian menurun. Adanya titik balik adalah bahwa lingkungan alamiah memiliki adaya dukung tertentu, yaitu merupakan jumlah populasi maksimum yang dapat ditampung oleh lingkungan alam (*carrying capacity*).

Ketersediaan (potensi) sumberdaya alam tersebut dapat terancam apabila tidak disertai dengan pengaturan pemanfaatannya. Oleh karena itu diperlukan peran lembaga

lokal yang ada dan tumbuh berkembang dimasyarakat agar dapat lebih terjaga kelestariannya. Hal ini penting mengingat kesadaran yang timbul dan sesuai dengan keinginan masyarakat akan dapat lebih optimal dalam melestarikan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkesinambungan tersebut memerlukan apresiasi dalam bentuk usaha dan pengembangannya. Untuk itu diperlukan sumber pendanaan yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Agar semua sesuai dengan harapan maka model lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat lokal sangat dibutuhkan, agar tidak merugikan sumber permodalan (bank ataupun lembaga lain) dan memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat pengguna jasa.

Memperhatikan konsep pertumbuhan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut, maka dasar pemikiran penelitian ini adalah bahwa:

- Sumberdaya perikanan laut di Pesisir Prigi Kabupaten Trenggalek adalah wilayah perairan laut selatan Jawa yang termasuk wilayah *under exploited* dengan potensi yang cukup besar dan bernilai ekonomis tinggi. Dengan demikian sistem usaha perikanan harus lebih produktif dan rasional, agar mampu menjadi basis pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
- Kemampuan sumberdaya manusia sebagai pengelola dan pengguna sumberdaya belum memadai ditambah dengan keterbatasan dalam penguasaan modal untuk pengembangan usaha. Dengan demikian peran lembaga ekonomi keuangan sebagai sumber modal menjadi sangat penting. Oleh karenanya perlu adanya kajian untuk mengetahui model seperti apa yang dipandang sesuai dengan kondisi setempat.
- Keberadaan struktur kelembagaan, perlu diintegrasikan agar terjadi sistem pengelolaan usaha yang sehat dan profitable sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dapat dicapai. Dengan demikian peran serta kelembagaan, baik kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan adat bisa lebih berperan dalam membantu kehidupan usaha dan perekonomian masyarakat setempat.

4.2. Pendekatan Studi

Keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan ditentukan oleh beberapa aspek, antara lain kondisi fisik lingkungan secara umum tercakup dalam SDA, keadaan sosial, ekonomi, masyarakat atau tenaga pengelola (SDM), sarana dan prasarana usaha, dan Kelembagaan. Untuk mengetahui kondisi sumberdaya sebagaimana tersebut di atas diperlukan pengumpulan data primer maupun data sekunder dan inventarisasi potensi sumberdaya yang dapat dipakai sebagai bahan dasar perencanaan.

Secara garis besar metode pendekatan penelitian pengelolaan sumberdaya perikanan ini melalui tahapan sebagai berikut:

(a) Pengumpulan Data dan Analisis

Pengumpulan data dan analisis dibagi menjadi kondisi sumberdaya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) terkait dengan bidang usaha, kelembagaan (Ekonomi-keuangan dan lokal) dalam pengelolaan sumberdaya.

Hasil analisis data fisik lingkungan (SDA) akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi lingkungan pengelolaannya, potensi, dan tingkat pemanfaatannya. Dari data sosial ekonomi dan karakteristik sumberdaya manusia akan diketahui potensi dan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya sesuai dengan bidang usahanya. Dari keberadaan kelembagaan, baik kelembagaan adat, ekonomi tradisional maupun kelembagaan ekonomi modern akan data diketahui sejauhmana kelembagaan tersebut berperan dalam pemanfaatan sumberdaya. Berdasarkan hal di atas maka akan dapat diskenariokan model pengembangan usaha masyarakat pesisir di daerah penelitian.

(b) Inventarisasi Sumberdaya dan Potensi

Pada tahap inventarisasi sumberdaya dan potensi, akan dapat diketahui peluang dan kendala pengembangan khususnya dalam pengelolaan sumberdaya yang dihadapi, termasuk alternatif usaha dalam pemanfaatan potensi.

Pengembangan usaha dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dibuat berdasarkan 4 aspek esensial dalam pembangunan, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan. Dengan dasar potensi tersebut disusun suatu konsep pengembangan yang mempertimbangkan beberapa kepentingan, yaitu pengelolaan sumberdaya yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan bahan baku pengelolaan yang lestari dengan memperhatikan aspek teknologi dan tuntutan pasar.

(c) Partisipasi (PRA)

Partisipasi riset diperlukan dalam kerangka *technical assistance* dalam perencanaan pengembangan usaha, terutama terkait dengan perencanaan akses modal.

4.3. Metode Analisis Penelitian:

Untuk mencapai tujuan penelitian dan pendekatan studi yang digunakan, maka penelitian ini mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

♦ **Langkah pertama**

Kajian lapang, yaitu suatu tahapan kegiatan untuk lebih memahami permasalahan, potensi, peluang dan kebutuhan, yang dapat melahirkan berbagai macam profil yang ada di daerah penelitian.

♦ **Langkah kedua**

Kajian penganalisaan keadaan lokasi untuk penentuan tindakan. Caranya dengan 4 alat kajian yaitu :

1. Sketsa Lokasi (SDA).

Sketsa desa adalah gambaran desa secara umum mengenai keadaan sumber daya alam yang ada , untuk mengetahui potensi umum yang memungkinkan sebagai aktivitas usaha.

2. Kalender musim dan kegiatan (SDM)

Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat dan ragam kegiatan usaha, yaitu saat-saat dirasakannya masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang dan saat sejahtera. Hal ini penting sebagai pertimbangan masukan model terkait dengan kelembagaan.

3. Teknologi

Gambaran penguasaan teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya dan kesesuaian teknologi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha, agar dapat diketahui potensi ketersediaan sumberdaya untuk pengembangan kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. Bagan kelembagaan.

Bagan kelembagaan adalah alat kajian untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat) lembaga-lembaga di desa pesisir bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.

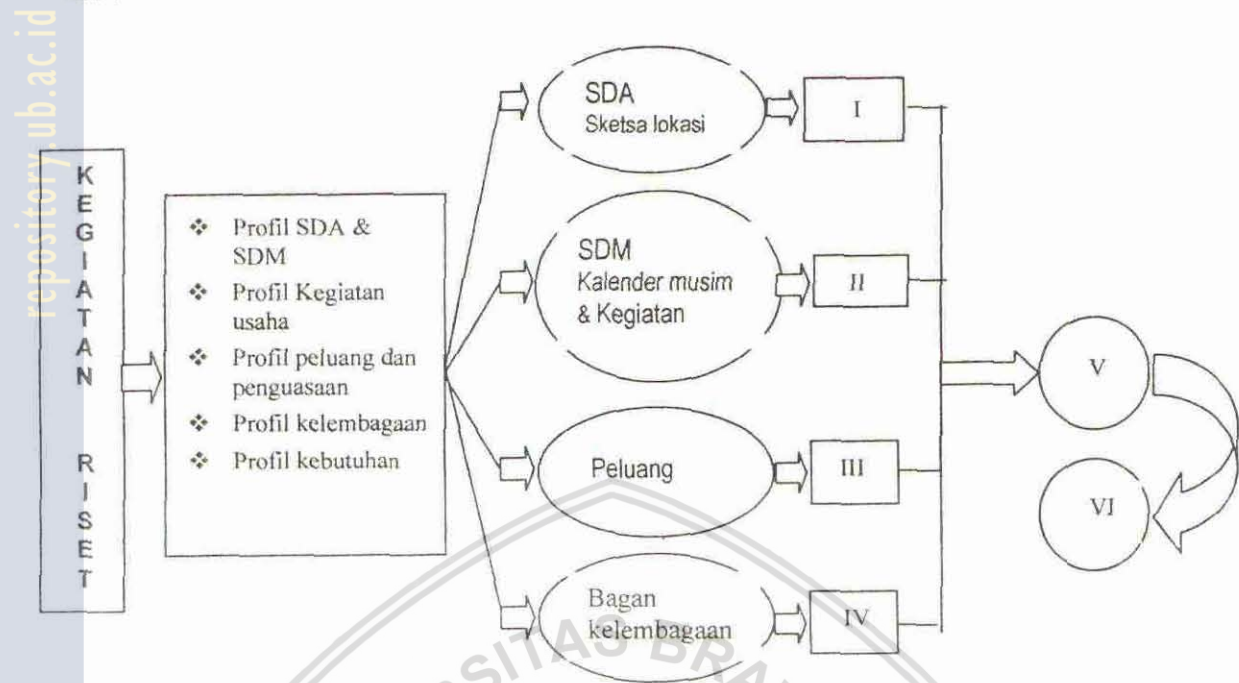
Untuk memastikan tindakan yang dipilih tepat dan diharapkan mampu memecahkan masalah, maka dapat dipilih tindakan melalui 4 kegiatan yaitu pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, penentuan peringkat tindakan.

♦ **Langkah ketiga,**

Langkah penentuan model yang didasarkan pada keberadaan lembaga ekonomi-keuangan dan lembaga lokal (adat) dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu kesejahteraan dalam kaitannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya.

Skema langkah-langkah kegiatan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar

4.1 :



Gambar 4.1. Langkah-langkah kegiatan penelitian

Penelitian tahun pertama, akan sampai pada langkah mengidentifikasi mengenai kondisi SDA, SDM, profil usaha, peluang usaha dan kelembagaan dengan analisis diskriptif kuantitatif maupun kualitatif dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kondisi Fisik Kawasan¹

Teluk Segarawedi (Prigi)² adalah perairan pantai dari wilayah Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kecamatan Watulimo terdiri dari 12 desa, dengan tiga pantai. Luas wilayah daratan Kecamatan Watulimo ± 15.444 ha, dengan karakteristik topografi berbukit, kemiringan $> 30\%$. Total wilayah tangkapan (catchment area) DAS yang bermuara di Pantai Prigi, mencapai ± 11.041 ha. Sumberdaya dominan di daratan adalah hutan, yang luasnya semakin menurun drastis sebagai akibat mekanisme *gopla*³.

Panjang total garis pantai Teluk Prigi adalah $\pm 25,6$ km, dengan garis pantai landai berpasir 11,15 km dan pantai curam 14,45 km. Di kawasan teluk dan di luar teluk terdapat sejumlah 20 pulau-pulau kecil. Luas total wilayah pantai sampai gugus pulau terluar adalah ± 9.855 ha. Muara sungai yang terdapat di teluk ini adalah Pancer Ledong, Pancer Ngemplak, Pancer Cengkong, Pancer Ngrumpukan dan Pancer Bang. Hutan bakau alami ditemukan di Pancer Cengkong dan Pancer Bang. Terumbu karang ditemukan di Karang Malang, Watu Bentis & Karanggongso, Pasir Putih, Ngrumpukan dan Wonojoyo. Rumput laut alami (*lemnathi*) tumbuh di antara karang dalam jumlah yang sangat terbatas.

5.1.1. Sumberdaya Habitat

Sumberdaya daratan yang bagi penduduk di Kecamatan Watulimo adalah hutan. Sejumlah ± 950 ha ($<1\%$) hutan diidentifikasi sebagai lahan kritis. Eksploitasi hutan dengan model *gopla*, yang dikombinasi dengan penebangan massal telah semakin memperluas lahan kritis, yang berdampak pada erosi, banjir, sedimentasi dan siltasi serta rusaknya habitat dan sumberdaya pantai.

Sumberdaya habitat yang teridentifikasi adalah muara sungai, hutan bakau dan terumbu karang. Pancer Ledong terdapat di sebelah timur lokasi pelabuhan, dalam wilayah Desa Tasikmadu dan tidak ada aliran air. Pancer Ngemplak yang terdapat di Desa Prigi,

¹ Bagian ini didasarkan pada Profil Bagan Proyek Cofish Kabupaten Trenggalek.

² Prigi adalah nama sebuah desa di Kecamatan Watulimo yang hanya memiliki panjang pantai sekitar 1,5 km, namun nama ini juga digunakan untuk menyebut Pantai Prigi atau Teluk Prigi yang sebenarnya terdiri dari tiga wilayah administratif, yaitu Desa Tasikmadu, Desa Prigi dan Desa Karanggandu.

³ *Gopla* adalah nama seorang penduduk di Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, yang memiliki kebiasaan meniru petugas kehutanan. Ia merasa sebagai petugas kehutanan dan sering melakukan "mbukak alas" (menebang beberapa pohon dan menanam dengan tanaman pangan). Perilaku menyimpang *Gopla* ini ditiru oleh sebagian besar penduduk di sekitar hutan untuk menebang hutan dan melakukan penanaman padi, pisang dan lain-lain. Pihak Perhutani seakan membiarkan perbuatan tersebut. Saat ini hampir 90 % hutan dibabat dengan sistem *gopla* ini.

sebelah Barat BBUG sedang dilakukan replantasi hutan bakau (*Rhizophora spp.*) dan ketapang (*Terminalia cattapa*) oleh Pemerintah Kecamatan Watulimo, mencapai luas 1,5 ha. Di lokasi ini ada penambangan pasir. Luas Pancer Cengkong ± 66 ha dalam kondisi menyusut karena ditebang dan dialihfungsikan untuk tanaman kelapa. Luas Pancer Bang ± 10 ha dengan kondisi yang serupa dengan Pancer Cengkong. Terumbu karang terdapat di lima lokasi, yaitu di Karang Malang ($\pm 5,3$ ha, penutupan $< 40\%$), terumbu karang Watubentis & Karanggongso (± 3 ha, penutupan 40-60%), terumbu karang Pasir Putih ($\pm 1,5$ ha, penutupan $< 40\%$), terumbu karang Ngrumpukan (± 1.0 ha, penutupan $< 40\%$) dan terumbu karang Wonojoyo (± 4.0 ha, penutupan $> 60\%$).

Kawasan pantai landai dan berpasir ditumbuhi oleh formasi *Ipomoea pescarpae* dan tanaman pandan. Hasil identifikasi menemukan 4 jenis bakau dari 7 jenis tanaman penyusun hutan bakau. Keempat jenis tersebut adalah: (i) bakau (*Rhizophora spp.*), (ii) api-api (*Avicenia spp.*), (iii), perepat (*Sonneratia spp.*), (iv) tanjang (*Bruguiera spp.*). Formasi hutan bakau didominasi oleh bakau (131 pohon/ha), perepat (49 pohon/ha), api-api (42 pohon/ha) dan tanjang (35 pohon/ha). Satwa yang ditemukan di Pancer Cengkong antara lain burung rangkong dan kadal air (*nyambik*), dulu menurut penuturan masyarakat di kawasan ini ada buaya.

Penutupan terumbu karang (kecuali di Watubentis & Karanggongso dan Wonojoyo) adalah bervariasi antara 2,3 – 7,5 %, atau rata-rata 4,32%, termasuk kategori jelek. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh: (a) pengambilan karang dengan linggis untuk cenderamata (pariwisata), (b) diinjak oleh wisatawan saat surut (pariwisata), dan (c) perusakan oleh nelayan yang menggunakan potas. Organisme yang dijumpai di habitat terumbu karang adalah: karang otak, karang bercabang, cangkang kima raksasa (*Tridacna spp.*), kerang kerucut, teritip, kelomang (*Pagurus spp.*), bintang laut, teripang, octopus, udang batu (bletok), kepiting, cacing warna, belut laut dan beberapa jenis ikan hias.

5.1.2. Kualitas Air

Kandungan Total Suspended Solid (TSS) terhadap *moving load* di muara sungai bervariasi antara 100 – 200 mg/liter, turbiditas air (0,8 – 8,5 TE/F), pH (7,3 – 7,9), oksigen terlarut (5,5 – 8,3 mg/liter), salinitas $\pm 32,1$ ppt. Kandungan logam berat (Cd, Cu, Pb, Zn, dan Fe) di bawah ambang batas, sedangkan total Coliform $< 0,0001$ JPT 100 m/liter. Kualitas air layak untuk budidaya laut.

Produktivitas primer (PP) antara 1,80 – 3,10 mg O₂ 10 jam⁻¹ (rata-rata 2,3 mg O₂ 10 jam⁻¹). Populasi fitoplankton $3,2 \times 10^3$ sel/liter (diatom dominan), kepadatan

zooplankton 3,7 # per liter, termasuk benur dengan estimasi kepadatan 1,6 # per liter di permukaan air.

5.1.3. Sumberdaya Ikan

Berdasar pada data di PPI di Teluk Prigi terdapat 18 jenis ikan, yaitu: tuna, tongkol, cakalang, kuwe, ekor merah, slengseng, tetengkek, kembung, selar, layang, lemuru, layur, peperek, cucut, cumi-cumi, cendro, julung-julung, dan teri. Ikan yang dominan ditangkap adalah jenis ikan pelagis oseanik seperti tuna, cakalang, dan kuwe. Sejumlah 33,9% hasil tangkapan adalah ikan tongkol, yang memberikan kontribusi sejumlah 43,3% pada penerimaan nelayan. Pada saat ini ikan layur menjadi sumber pendapatan utama nelayan skala kecil. Ikan-ikan demersal ditangkap dominan oleh pukat pantai.

Musim ikan secara rinci adalah: (a) musim paceklik (Januari-April), (b) musim sedang (April-Mei dan November-Desember) dan (c) musim puncak (Juli-Oktober). Musim sedang pertama (April-Mei) ditandai dengan meningkatnya hasil tangkapan ikan layur. Saat musim ikan puncak, yaitu adanya peningkatan hasil tangkap ikan jenis pelagis-oseanik, yang didominasi oleh purse seine, maka banyak nelayan pancing yang menjadi pendega purse seine. Penangkapan dengan jaring tarik dilakukan sepanjang tahun, tetapi mereka akan mengentikan penangkapan bila nelayan purse seine beroperasi. Di musim paceklik nelayan pancing ulur dengan perahu kecil melakukan penangkapan ikan, sementara banyak yang mencari kerang (dagungnya disetor ke restoran dan cangkangnya dijual ke pabrik pakan unggas). Antara tahun 1997 – 1998 total hasil tangkapan meningkat sampai 100% dan penerimaan meningkat sampai 1.000%. Peningkatan produksi diduga karena ada pengaruh dari *el-nino*, sementara peningkatan penerimaan banyak disebabkan oleh depreciasi nilai rupiah terhadap mata uang asing.

5.1.4. Armada Perikanan dan alat tangkap

Berdasarkan tipe perahu, armada perikanan yang ada terdiri dari alat tangkap tanpa perahu 40 unit, perahu tanpa motor 406 unit, perahu motor tempel 52 unit, perahu motor dalam 77 unit. Alat tangkap tanpa perahu adalah pukat pantai, namun dalam kenyataan menggunakan alat bantu perahu saat mengibarkan jaring dan pengawasan saat kantong penuh ikan. Klasifikasi ukuran perahu bermotor: (a) < 5GT (10 unit), (b) 5 – 10 GT (42 unit), (c) 10 – 20 GT (76 unit), (d) 33 GT (satu unit). Perahu tanpa motor terdiri dari: (i) perahu jukung (43 unit), (ii) perahu papan kecil (< 7 meter, 192 unit), (iii) perahu papan sedang (7 – 10 meter, 169 unit).

Jumlah unit usaha penangkapan ikan adalah 574 unit, yang terdiri dari: (a) payang besar (25 unit), (b) payang jurung (1 unit), (c) pukot pantai (40 unit), (d) purse seine (77 unit), (e) gill net - prawe (185 unit), (f) pancing ulur (264 unit). Alat tangkap sotok, bagan, jaring blengker, pithil, eder dan petotan, alat garu kerang tidak termasuk dalam sensus alat tangkap utama dalam RTP. Alat tangkap yang dominan dioperasikan adalah: (1) purse seine, payang dan gill net – prawe, (2) pancing ulur dan (3) jaring tarik.

5.1.5. Daerah dan Hasil Penangkapan

Daerah penangkapan purse seine di luar teluk, di sekitar gugus pulau dan juga keluar dari kawasan teluk. Payang sering melakukan penangkapan di dekat mulut teluk dan di dalam teluk. Gill net – prawe dioperasikan jauh ke luar teluk (di luar jalur 12 mil laut). Pancing ulur dilakukan pada sekitar teluk sampai pada di sekitar gugus pulau terluar. Pukat pantai dioperasikan sepanjang pantai dengan panjang uluran jaring sampai 1000 meter.

Hampir seluruh hasil tangkapan dijual dalam bentuk segar. Nelayan yang mempergunakan es untuk mempertahankan mutu hasil tangkapannya adalah pada alat tangkap pancing ulur dan gill net – prawe. Nelayan ini menggunakan stereoform dengan 1 buah es balok.

5.2. Kondisi Sosial-Budaya Kawasan

Wilayah Kecamatan ini terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan dataran rendah yang terdiri dari lima desa (Sawahana, Margomulyo, Prigi, Tasikmadu, dan Karanggandu) dan di kawasan dataran tinggi ada 7 desa (Slawe, Dukuh, Gemaharjo, Watulimo, Ngembel, Pakel dan Watuagung). Ketinggian wilayah dari permukaan alau antara 5 – 690 m, dengan kemiringan yang cukup terjal. Penduduk di kawasan dataran rendah lebih banyak mengakses pada sumberdaya perikanan dan pariwisata, sementara penduduk di kawasan dataran tinggi lebih banyak mengakses sumberdaya kehutanan. Ketika hutan-hutan di kawasan dataran rendah sedang dieksploitasi dengan sistem *gopla*, maka penduduk dari dataran tinggi banyak yang terlibat dalam proses itu. Beberapa tenaga kerja penarik jaring pada pukot pantai berasal dari desa-desa di dataran tinggi, demikian juga di dataran tinggi juga terdapat bakul-bakul ikan dalam skala kecil. Sebagian dari penduduk menjadi tenaga kerja Indonesia (Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Brunei dan Taiwan).

5.2.1. Kependudukan

Jumlah penduduk 59.492 jiwa, yang terdiri dari pria 29.251 jiwa dan wanita 30.241 jiwa. Sebagai besar penduduk beragama Islam dengan budaya Jawa yang dominan. Masyarakat di Prigi dapat dikategorikan sebagai: (a) masyarakat perikanan (nelayan, petani ikan, pengolah, pedagang dan pekerja perikanan yang berjumlah 20% dari total penduduk di Kecamatan Watulimo, (b) masyarakat berinteraksi langsung (pemilik bengkel, penyedia saprodi, pemikul), (c) masyarakat berinteraksi tidak langsung (pariwisata) dan (d) masyarakat non –perikanan.

Profil masyarakat perikana menunjukkan pria cenderung akses di segala usaha penangkapan, sementara wanita akses pada usaha pengolahan, sebagai pekerja perikanan dan di bidang perdagangan ikan. Rata-rata jumlah anggota keluarga 4 orang dengan tingkat pendidikan secara umum ≤ 6 tahun. Etnis dominan adalah suku Jawa dan sudah > 5 tahun menetap di kawasan ini. Secara umum usaha telah dijalankan > 10 tahun, dengan usaha sampingan masih di bidang perikanan, pertanian dan perdagangan.

5.2.2. Prasarana dan Ekonomi

Prasarana untuk menunjang kegiatan perikanan belum memadai. Di daerah ini terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai, yang menyediakan bengkel, agen BBM dan penyewaan keranjang. Selain itu juga terdapat KUD dan TPI. Di kawasan fasilitas pendaratan ikan belum berfungsi dengan baik dan juga belum ada fasilitas docking perahu.

Gambaran umum ekonomi menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat yang dapat mengakses sumberdaya perikanan cenderung lebih tinggi daripada desa-desa lainnya. Dalam klasifikasi berdasarkan BKKBN, maka untuk lima desa di dataran rendah berada pada level B (25-50% KK PraSejahtera dan Sejahtera-I) untuk 7 desa di dataran tinggi berada pada level C (50-75% KK PraSejahtera dan Sejahtera-I) untuk lima desa dan dua desa lainnya berada dalam level D ($>75\%$ KK PraSejahtera dan Sejahtera-I).

Analisis ketersediaan lapangan pekerjaan menunjukkan sejumlah 4.559. Dengan jumlah pekerja perikanan 1.728 orang, maka setiap orang masyarakat perikanan memiliki peluang pada 2,6 lapangan pekerjaan. Pada saat musim ikan banyak tenaga non-perikanan yang dapat mengakses kerja di lapangan pekerjaan perikanan.

Alternatif usaha yang dapat dikembangkan di Prigi terdiri dari 4 kelompok: (a) W-SLA dengan jenis usaha: kerupuk ikan, ikan asap, abon ikan, kecap ikan, petis ikan, sosis ikan dan ternak ayam; (b) P-SLA dengan jenis usaha tepung ikan; (c) W-Lokalita dengan jenis usaha: budidaya katak, budidaya gurami, budidaya rumput laut, ternak kambing dan

ternak ayam; dan (d) P-lokalita dengan jenis usaha: multi alat tangkap (gill net + prawe + tonda), pancing ulur, budidaya rumput laut dan tepung ikan.

5.2.3. Sosio-budaya

Masyarakat Pantai Prigi dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang berkebudayaan petani (*peasant society*), dengan ciri utama patuh pada pimpinan formal dan enggan berterus terang. Pada perkembangan sejarah merupakan perluasan budaya zaman Mataram (abad XVII). Etnis Jawa dan kebudayaan *kejawan* mendominasi dalam kehidupan masyarakat. Islam memberikan pengaruh pada tata nilai keagamaan.

Organisasi sosial di Prigi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori: (a) berbasis Islam (Yayasan Riadlatul Thalibun, yang menyelenggarakan Pondok Thoriqot Naqsabandiah dan Lembaga Pendidikan Ma'arif); (b) berbasis kepemudaan (Karang Taruna pemuda Anshar, IPNU dan IPPNU = Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Perempuan NU), (c) organisasi profesi (P2WTN = Peningkatan Peranan Wanita Tani dan Nelayan, Asosiasi Nelayan Purse Seine, Kelompok Arisan = modal dan *life cycle*), dan dua LSM yaitu LPK (Lembaga Pengembangan Kenelayan) di Karanggongso dan PAMA di Desa Sawahan (d) organisasi sosial formal, yaitu: KUD Mina Tani Sempurna, Pelabuhan Perikanan Pantai Prigi, Koperasi Nelayan, Tim Pengendali Nelayan Andhon, HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), BBUG (Balai Benih Udang Galah), dan kelembagaan kependidikan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

5.2.4. Hukum dan kesadaran lingkungan

Pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perikanan, keterbatasan sarana dan prasarana serta aparat penegakan hukum, dan sentralisme substansi hukum yang ada, menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran. Berbagai bentuk pelanggaran dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) pelanggaran pada SK Menpan No. 607/Kpts/Um/1976 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan, (b) pelanggaran pada SK Mentan No. 123 tahun 1975 tentang ketentuan lebar mata jaring dan (c) penyimpangan terhadap PP No 15/1990 tentang Usaha Perikanan jo SK Mentan No. 815/Kpts/Ik/120/11/1980 tentang Perijinan Usaha Perikanan, jo Perda No. 10 Tahun 1989 tentang Ijin Usaha Perikanan di Jawa Timur, jo SK Kadiskam Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Dati I Jawa No. 10/1989 tentang Ijin Usaha Perikanan di Jawa Timur.

Di satu sisi masyarakat melakukan perusakan lingkungan (penebangan hutan bakau, perusakan terumbu karang), namun di sisi yang lain sadar pada tingkat pemahaman

perubahan lingkungan. Pengetahuan perubahan pada lingkungan dan sumberdaya itu antara lain: (a) ikan semakin menjauh dari teluk, (b) ada kerusakan pada terumbu karang dan hutan bakau dan (c) mengecilnya hutan serta bertambahnya lahan kritis. Meskipun kesadaran pada kerusakan lingkungan tinggi, namun bila tidak langsung menyentuh pada kehidupan ekonomi mereka, mereka tidak memberikan respon.

Sisa-sisa hukum adat masih dijumpai pada kelompok nelayan Jaring Tarik. Kelompok ini memiliki organisasi yang sederhana, wilayah dan aturan waktu penangkapan dengan sistem *antri tibar*, sistem upah dan pola penyelesaian konflik. Pola pengelolaan sumberdaya ini dikenal sebagai TURF (*Territorial User Right of Fisheries*). Namun sayang sekali perhatian pemerintah pada alat tangkap dan sistem adat ini sangat kurang.

5.3. Kawasan Prigi Saat Ini

Setelah Proyek Cofish berakhir pada tahun 2005 dan dengan adanya stimulan perkembangan usaha penangkapan dengan menggunakan rumpon laut dalam, maka berbagai perubahan telah terjadi. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut kondisi fisik kawasan pesisir Pantai Prigi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk kelembagaan keuangan mikro yang ada.

5.3.1. Kondisi fisik kawasan pesisir

Sejak tahun 1980-an kawasan ini telah berkembang menjadi kawasan wisata. Berbagai hotel dan penginapan telah dibangun oleh investor di kawasan pantai. Di kawasan Karanggongso, bagian Timur dari Teluk Prigi, dibangun penginapan Pondok Prigi I dan II. Selain itu juga ada bangunan hotel yang kemudian dijadikan sebagai rumah "sarang" burung. Beberapa rumah juga dibangun di bibir pantai. Perubahan ini telah mendesak tempat-tempat berlabuh ("glandhangan") bagi perahu-perahu ukuran kecil ke kawasan pemakaman umum. Sementara itu bagian terbarat dari Dusun Karanggongso, yaitu Pasir Putih selain digunakan sebagai kawasan wisata, juga telah digunakan sebagai Kawasan Laut Lindung (*Fish Sanctuary*), dengan luasan area mencapai 81.000 ha. Karanggongso saat ini juga merupakan bagian dari pengembangan Jalur Lintas Selatan, sehingga akses ke kawasan ini menjadi semakin terbuka.

Di kawasan Prigi (Ketawang, bagian Tengah dari Teluk Prigi) telah dibangun pelabuhan perikanan, dengan segala kelengkapannya. Keberadaan pelabuhan ini di satu sisi mempermudah akses tambat labuh bagi kapal-kapal perikanan skala kecil, seperti kapal untuk purse seine, perahu untuk payang, perahu sekoci untuk menangkap ikan tuna. Di sisi

lain telah menggeser lokasi fishing ground bagi nelayan jaring tarik. Bagian timur dari kawasan ini, yaitu di Bengkorok sedang dibangun lokasi Pusat Pengolahan Ikan.

Di kawasan Damas, yang merupakan bagian terbarat dari Teluk Prigi digunakan oleh penduduk sebagai tempat pemukiman. Rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan oleh Proyek Cofish di kawasan ini, saat ini luasan arealnya semakin menyusut karena digunakan oleh penduduk sebagai lahan pertanian (kelapa dan padi). Di bagian timur dari kawasan Damas, yaitu di Ngrumpukan sedang diujicoba budidaya mutiara.

Perubahan fisik kawasan pesisir ini juga tidak terlepas dari perubahan "perwajahan" hutan di sekelilingnya yang berubah menjadi areal pertanian dengan sistem "gopla". Berbagai tanaman semusim ditanam dalam kawasan hutan, seperti padi, jeruk dan pisang. Saat ini sistem pengelolaan hutan sedang dilakukan dengan sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

5.3.2. Perubahan Sistem Penangkapan Ikan

Dua hal yang merupakan faktor pendorong terjadinya perubahan sistem penangkapan ikan adalah adanya pengelolaan perikanan layur, dan penangkapan ikan di lepas pantai dengan rumpon laut dalam. Rencana pengelolaan perikanan layur telah mendorong nelayan untuk meningkatkan kapasitas usaha penangkapan. Pancing ulur, yang pada tahun 1980-an merupakan alat tangkap dominan, dan kemudian mulai mengalami surut, dikembangkan dengan memperbesar ukuran perahu (dari panjang 4 meter, ke panjang 11 meter) dan penggerak perahu (dari dayung ke motor tempel) untuk melakukan penangkapan ikan layur. Saat ini karena ikan layur tidak lagi berlimpah, maka sebagian nelayan kemudian beralih ke alat tangkap payang.

Penggunaan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon laut dalam yang dipasang pada lintang 9° – 10° lintang selatan telah mendorong kepada perkembangan perahu-perahu sekoci dan perahu pancing ulur ukuran besar untuk melakukan penangkapan ikan ke kawasan tersebut. Saat ini banyak pula nelayan purse seine yang menangkap ikan di lokasi rumpon, yang dipasang secara khusus untuk menjadi daerah penangkapan mereka.

5.4. Usaha Perikanan dan kontribusinya terhadap PAD.

Selama masa otonomi daerah diluncurkan sejak tahun 1999 paling tidak ada dua penyikapan pemerintah daerah terhadap iklim ekonomi tersebut. Menurut pantauan majalah Tempo (2007) dua sikap pemerintah daerah terhadap iklim ekonomi itu adalah, pertama daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menaikkan pungutan pada retribusi dan pajak, dan kedua daerah seoptimal mungkin mengembangkan investasi berdasarkan sumberdaya lokalnya.

5.4.1. Gambaran Umum Usaha Perikanan

(a) Penangkapan

a.1 Musim Penangkapan Ikan

Secara umum musim penangkapan ikan dibagi ke dalam empat kategori. Pertama, adalah musim paceklik yang terjadi pada bulan Desember sampai Maret, kedua awal musim pada bulan April sampai Juni, ketiga puncak musim terjadi pada bulan Agustus sampai September, dan keempat, akhir musim pada bulan Oktober-November. Penangkapan ikan umumnya dilaksanakan ketika gelap bulan, namun karena sekarang ada rumpun, maka beberapa nelayan juga menangkap ikan pada saat terang bulan.

a.2 Armada Perikanan

Jumlah armada perikanan tahun 2006 adalah 1107 unit dengan ukuran kapal di bawah 30 GT, yaitu terdiri dari kapal berukuran < 10 GT 741 unit (66,94%), $10 \leq 20$ GT 136 unit (12,28%) dan $20 \leq 30$ GT 230 unit (20,78%). Dibanding dengan pada tahun 2005 sebesar 874 unit, berarti mengalami peningkatan sebesar 233 unit (26,66%). Frekuensi kunjungan kapal tahun 2006 ini tercatat 22.952 kali yang berarti mengalami penurunan sebesar 10.577 kali (31,55%) dari tahun 2005 sebesar 33.529 kali.

a.3 Jenis Alat Tangkap

Jumlah alat tangkap di PPN Prigi pada tahun 2006 adalah sebesar 1.677 unit yang terdiri dari Pancing Ulur 1.298 unit (77,40%), Pukat Cincin 115 unit (6,86%), Pancing Tonda 57 unit (3,40%), Pukat Pantai 42 unit (2,50%), Pancing Prawe 36 unit (2,15%), Jaring Klitik 50 unit (2,98%), Jaring Insang 43 unit (2,56%) dan Payang 36 unit (2,15%). Dibanding dengan jumlah alat tangkap pada tahun 2005 sebesar 1.757 unit, berarti mengalami penurunan sebesar 80 unit (4,55%). Sedangkan komposisi nelayan di PPN Prigi pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1. Komposisi nelayan di PPN Prigi pada tahun 2006

No.	Jenis Nelayan	Jumlah Nelayan (orang)
1.	Nelayan alat tangkap purse seine	3.000
2.	Nelayan alat tangkap gill net	102
3.	Nelayan alat tangkap jaring klitik	72
4.	Nelayan alat tangkap pancing ulur	1.298
5.	Nelayan alat tangkap pukat pantai	1.008
6.	Nelayan alat tangkap payang	320
7.	Nelayan alat tangkap pancing tonda	255
8.	Nelayan alat tangkap pancing prawe	180
Jumlah		6.235

(Sumber : Laporan Statistik Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2006)

a.4 Produksi Perikanan

Pada tahun 2006 volume produksi perikanan yang didaratkan di PPN Prigi sebesar 23.603 ton dengan nilai Rp 83.485.900.000,-. Dibanding dengan tahun 2005 sebesar 14.346 ton dan senilai Rp 51.064.500.000,- berarti mengalami peningkatan volume sebesar 9.257 ton atau 60,78% dan nilai produksi mengalami peningkatan sebesar Rp. 32.421.400.000,- atau 63,49%. Peningkatan produksi ikan ini dikarenakan pada tahun 2006 terjadi musim ikan, selain itu produksi ikan unggulan seperti ikan lemuru, layang deles, tongkol como dan cakalang mengalami peningkatan.

a.5 Jenis Ikan Tangkapan

Produksi ikan terbanyak yang didaratkan di PPN Prigi pada tahun 2006 adalah dari jenis ikan pelagis seperti Lemuru 8.036 ton (34,04%), Tongkol como 7.309 ton (30,97%), dan Layang deles 4.395 ton (18,62%). Jenis ikan tangkapan yang didaratkan di PPN Prigi pada tahun 2006 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.2 .

Produksi hasil tangkapan tersebut sebagian besar ditangkap dengan menggunakan alat tangkap Pukat cincin yaitu sebesar 19.398 ton (82,19%). Sedangkan sisanya diproduksi dengan menggunakan alat tangkap Pancing Tonda 956 ton (4,05%), Pancing Ulur 86 ton (0,36%), Payang 2.394 ton (10,14%), Pukat Pantai 200 ton (0,85%), Jaring Insang 467 ton (1,98%), Jaring Klitik 82 ton (0,35%) dan Lainnya 20 ton (0,08%).

Tabel 5.2. Jenis dan jumlah ikan tangkapan yang didaratkan di PPN Prigi pada tahun 2006

No.	Jenis Ikan	Jumlah Tangkapan (ton)	Persentase (%)
1.	Lemuru	8.036	34,04
2.	Tongkol como	7.309	30,97
3.	Layang deles	4.395	18,62
4.	Layur	446	1,89
5.	Tuna mata besar	583	2,47
6.	Cakalang	1.327	5,62
7.	Layang benggol	448	1,90
8.	Jenis lainnya	1.059	4,49
Jumlah		23.603	100

(Sumber : Laporan Statistik Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2006)

(b) Budidaya

Sektor ini belum begitu berkembang di kawasan ini. Beberapa kali upaya mengembangkan budidaya rumput laut belum menunjukkan keberhasilan. Pada awal tahun 2000-an pernah ada yang mengusahakan budidaya udang windu, namun tidak dilanjutkan karena pada saat panen terjadi penjarahan oleh masyarakat. Usaha budidaya udang dan kepiting yang dirintis oleh pemerintah daerah juga belum berhasil diadopsi oleh masyarakat. Saat ini ada pengusaha yang mulai tertarik untuk melakukan budidaya mutiara di Pantai Damas.

Balai Benih Udang Galah yang dibangun di kawasan ini sejak puluhan tahun yang lalu menyediakan benih bagi pembudidaya ikan, yang kebanyakan bukan berada di kawasan pesisir pantai Prigi.

(c) Pengolahan Ikan

Pengolahan ikan yang pertama kali diusahakan adalah pengeringan ikan, pengasapan ikan, dan kemudian berkembang ke pemindangan ikan. Pada waktu-waktu tertentu ketika ubur-ubur melimpah di perairan, banyak pengusaha yang melakukan pengolahan. Namun pada saat sekarang, saat penelitian ini dilaksanakan, tidak ada pengolahan ubur-ubur. Sektor pengolahan ini dalam kategori tertentu. Beberapa orang mengusahakan tepung ikan dalam bentuk "gaplekan". Khusus pengelolaan sistem pengolahan pemindangan saat ini pemerintah daerah berusaha untuk mengembangkan sentral pengolahan di Bengkorok.

Jumlah pemindang saat ini 50 orang, dengan kapasitas produksi sampai 1 (satu) ton. Jumlah pengering ikan ada 30 orang dengan kapasitas produksi sekitar 100 kg. Pengusaha ikan basah ada 10 orang, dengan kapasitas 1 sampai 10 ton, sementara yang melakukan pengesan ada 6 orang dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton. Sejumlah 50 orang pedagang ikan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan box yang mampu memuat ikan sampai 100 kg.

(d) Distribusi dan Perdagangan Ikan

Pemasaran hasil perikanan dari PPN Prigi berupa produk ikan segar dan ikan olahan. Daerah tujuan distribusi meliputi wilayah lokal yaitu Trenggalek dan distribusi antar kota antara lain meliputi Trenggalek, Ponorogo, Kampak, Bandung, Tulungagung, Nganjuk, Surabaya, Malang, Madiun dan Jombang. Hasil olahan yang dijadikan bahan baku tepung ikan yaitu gaplekan dan kroposan dijual ke Mojokerto.

Produksi perikanan dari PPN Prigi yang didistribusikan dalam bentuk ikan segar sebesar 4.506 ton (19,09%) dan ikan olahan sebesar 19.097 ton (80,91%) yang meliputi ikan pindang 11.108 ton (47,06%), ikan asin 930 ton (3,94%), tepung ikan 6.721 ton (28,48%) dan ikan asap 338 ton (1,43%).

5.4.2 Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja yang melakukan kegiatan perikanan di PPN Prigi pada tahun 2006 adalah sebesar 8.619 orang, yang terdiri dari 6.271 orang nelayan (72,76%), pedagang/ pengolah ikan 975 orang (11,31%) dan tenaga lainnya 1.373 orang (15,93%). Dibanding tahun 2005 yaitu sebesar 8.538 orang, maka pada tahun 2006 di lingkungan PPN Prigi terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 81 orang atau 0,95%. Jumlah nelayan pada tahun 2006 sebanyak 6.271 orang mengalami peningkatan sebanyak 36 orang (0,58%) dari 6.235 orang di tahun 2005.

5.4.3. Kontribusi Usaha Perikanan terhadap PAD

Menurut penjelasan Administratur Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Prigi, kontribusi usaha perikanan terhadap PAD Kabupaten Trenggalek (khususnya) dari TPI dari tahun ketahun mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3. Kontribusi Usaha Perikanan Pada PAD dari TPI Prigi

No	Tahun	Kontribusi pada PAD (Rp)
1	2001	100.000.000
2	2002	133.000.000
3	2003	158.000.000
4	2004	185.000.000
5	2005	195.000.000
6	2006	310.000.000

Kenaikan PAD dari usaha perikanan di Pantai Prigi ini berkaitan dengan semakin intensifnya usaha penangkapan, terutama setelah adanya introduksi pemasangan alat bantu penangkapan berupa rumpon laut dalam diadopsi oleh nelayan. Pertama kali rumpon laut dalam ini hanya digunakan oleh para nelayan pancing, namun saat ini sejumlah nelayan purse seine juga mengandalkan daerah penangkapannya pada pemasangan rumpon. Dengan adanya rumpon ini saat tidak musim ikan (paceklik) nelayan masih memperoleh hasil tangkapan dari operasi usahanya.

5.5. Profil Kelembagaan Ekonomi Keuangan Masyarakat Pesisir.

5.5.1. Perkembangan secara umum.

Kelembagaan Ekonomi Keuangan Mikro di kawasan pantai secara umum diawali oleh sistem *pachter*, yaitu sebuah kelembagaan yang diberi lisensi oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan pengelolaan perikanan (Mashuri, 1995). Kelembagaan ini kemudian melahirkan sistem *patron-client* yang berkembang di hampir semua kawasan pesisir, yang secara umum dikenal sebagai sistem "pengamba" di kawasan pantai Utara Jawa Timur, disebut sebagai "pinggawa-sawi" di Sulawesi, sistem "papagan" di Lamongan, atau "bakul-cekelan" di Pacitan. Di Prigi, nelayan yang tergantung kepada *patron*, disebut sebagai nelayan "tembakan". Kelembagaan keuangan sistem ini masih eksis hingga saat ini, yang oleh Pranadji (1995) dikenal sebagai bentuk kemitraan tradisi.

Pada tahun 1980-an, pemerintah mengenalkan Kelembagaan Keuangan Mikro ini dengan mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD)-Mina. Di Prigi juga dibangun sebuah KUD-Mina dengan nama KUD Mina Tani Sempurna, yang memberikan layanan permodalan kepada petani dan nelayan. Dalam dinamika masyarakat pesisir yang semakin berkembang, telah mendorong berbagai kelembagaan keuangan. Pada tahun 2000 di Pantai Prigi telah dikembangkan sebuah Koperasi Sinati, yang merupakan bentuk formal dari asosiasi nelayan purse seine. Dalam kurun waktu kemudian, dikembangkan pula sebuah

Koperasi Bakul Nelayan (KBN). Melalui Proyek PEMP juga dikembangkan sebuah kelembagaan keuangan dengan nama LEP-M3. Proyek Cofish juga mengembangkan kelembagaan keuangan dengan nama LKMP, yaitu Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir. Sementara itu nelayan pancing dan nelayan yang belum terwadahi oleh kelembagaan keuangan yang ada, mendirikan sebuah kelembagaan keuangan dalam bentuk koperasi dengan nama Koperasi PPCU (*Pantai Prigi Credit Union*).

Dua studi, dari berbagai studi kelembagaan keuangan yang relevan dengan riset ini, pertama adalah studi yang dilakukan oleh Susilo *et al* (1996-1998) adalah pembentukan kelembagaan akomodatif, yaitu sebuah kelembagaan baru yang mengintegrasikan antara kelembagaan tradisional patron-client dengan Unit Simpan Pinjam dari KUD Mina. Kelembagaan akomodatif ini kemudian dikembangkan sejajar dengan pola-pola *co-management* dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam. Model ini kemudian dikembangkan menjadi adaptor sosial (lihat Lestariadi *et al*, 2007). Kedua, adalah studi yang dilakukan oleh Khasanudin *et al* (2006) yang memberikan rekomendasi bagi terwujudnya sebuah Bank Perkreditan Rakyat Pesisir, yang merupakan sebuah amalgamasi dari sistem pengelolaan keuangan yang ada di Pantai Prigi.

5.5.2. Profil Kelembagaan Keuangan Mikro

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan, penelusuran pustaka (Khasanudin, 2006) dan dokumen Pantai Prigi Credit Union (RAT-4 dan Akte Pendirian Koperasi), diketahui bahwa profil Kelembagaan Keuangan Mikro yang ada di Pesisir Prigi berbentuk Lembaga Keuangan (Bank dan bukan Bank), koperasi, dan perseorangan.

5.5.2.1 Lembaga Keuangan

Secara umum lembaga keuangan yang ada ada dua, yaitu dalam bentuk bank, dan lembaga keuangan bukan bank.

(a) Lembaga Keuangan berbentuk Bank.

Di Pantai Prigi terdapat dua bank pemerintah, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sudah lama (puluhan tahun) dan Bank Jatim yang baru beroperasi sekitar dua tahun yang lalu. Kedua bank ini memiliki nasabah yang bekerja sebagai nelayan, kurang lebih mencapai 40 % untuk BRI dan sekitar 20 % bagi Bank Jatim. Menurut Khasanudin *et al* (2006) dan penjelasan key informan, BRI ini sudah ada sejak tahun 1970-an.

(b) Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Pantai Prigi pada umumnya didirikan karena ada program dari pemerintah. Paling tidak ada dua lembaga keuangan, yaitu yang berasal dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan dari Proyek Cofish.

(b-1). LEPP-M3

Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) adalah bagian dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Menurut Khasanudin, Qoid dan Susilo (2006) LEPP-M3 di Trenggalek didirikan pada tahun 2001 yang dimulai di Kecamatan Munjungan, sementara itu yang di Prigi baru didirikan pada tahun 2006. Sampai dengan saat ini jumlah nasabah mencapai 169 orang. Dari penjelasan key informan saat ini telah dikembangkan pula sebuah kedai pesisir, yang menyediakan kebutuhan bagi keperluan para pedagang, nelayan dan masyarakat luas. Jumlah pegawai terdiri dari 5 orang. Lembaga ini sekarang bekerja sama dengan Bank Bukopin Cabang Malang.

(b-2). Badan Keuangan Masyarakat Pantai (BKMP)

Badan Keuangan Masyarakat Pantai (BKMP) merupakan lembaga keuangan masyarakat yang dibentuk melalui Proyek Cofish. BKMP berkaitan erat dengan pengelolaan dana bergulir yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menerima bantuan paket teknologi dari Proyek Cofish. Salah satu komponen Proyek Cofish adalah Peningkatan Usaha Ekonomi (PUE), yang dilaksanakan dalam bentuk pinjaman secara bergulir. Proyek Cofish di dalam melaksanakan PUE, secara umum melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Pengorganisasian masyarakat nelayan dan pengembangan/ penguatan koperasi masyarakat dan/atau kelompok nelayan, (2) Penyediaan konsultasi teknis, kredit (termasuk pemanfaatan dana tabungan/berguliran), pemasaran sosial kepada koperasi dan/atau kelompok nelayan, (3) Pengembangan proyek-proyek peningkatan pendapatan dan usaha-mikro, dan (4) Peningkatan infrastruktur/prasarana sosial dasar. Dalam kegiatannya, BKMP melakukan pengelolaan bantuan pemerintah melalui Proyek Cofish dalam bentuk paket KUB (misalnya cool box, tempat penjemuran ikan, pengeringan, pemindangan, maupun untuk kegiatan non-perikanan, yaitu peternakan ambing) dalam sistem revolving.

5.5.2.2. Koperasi

Deskripsi tentang koperasi di kawasan ini diawali dari koperasi yang lebih dulu berdiri secara *de jure*, bukan didasarkan pada pengesahan badan hukum. Hal ini menjadi penting sebab dinamika perkoperasian di kawasan pesisir merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memahami sejarah sosial masyarakat. "Jatuh-bangun"-nya koperasi merupakan sebuah refleksi dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

(a) Koperasi Unit Desa Mina Tani Sempurna (KUD-MTS).

KUD ini berasal dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang berkembang secara nasional pada tahun 1980-an. KUD-MTS di masa lalu banyak terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan usaha perikanan. Sebelum tahun 2000, KUD-MTS juga melakukan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Saat ini KUD-MTS lebih memberikan aktivitas dalam kegiatan non-perikanan, misalnya melakukan pelayanan pupuk kepada petani, pelayanan pembayaran listrik, penyediaan bahan bakar minyak, dan penyediaan bahan kebutuhan masyarakat dalam warung serba ada (*waserda*). Meskipun menurut penjelasan key informan KUD-MTS lebih mengutamakan melakukan kegiatan non-perikanan, namun dalam laporan Khasanudin *et al* (2006), jumlah nasabah terbesar bekerja sebagai nelayan, dengan jumlah sampai 1.500 orang.

b. Koperasi Putri Bahari.

Mengingat peranan wanita dalam ekonomi rumah tangga di pedesaan sangat penting, maka pemerintah memberikan wadah organisasi ekonomi para wanita dalam sebuah perkumpulan yang diberi nama Peningkatan Peran Wanita Tani dan Nelayan (P2WTN). P2WTN beranggotakan para wanita dari lima perikanan, mulai dari Karanggandu, Prigi, Tasikmadu, Sawahan dan Margomulyo. P2WTN dibentuk sekitar tahun 1980-an. Menurut laporan Khasanudin *et al* (2006) perkumpulan ini sudah ada sejak tahun 1984, namun sebagai Koperasi Putri Bahari memiliki badan hukum pada tahun 1999.

Selama masa proyek Cofish (1998 s/d 2005) koperasi menjadi salah satu sasaran dari komponen proyek Pengembangan Usaha Ekonomi (PUE). Melalui sebuah LSM Spektra pernah didampingi untuk melakukan pemasaran abon sampai ke Surabaya. Selain itu para anggota koperasi ini sering mengikuti pameran-pameran produk perikanan, dan juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan pengolahan ikan, seperti pembuatan bakso, aneka akanan dari rumput laut, dan kecap ikan.

c. Koperasi Mina Teluk Prigi

Koperasi Mina Teluk Prigi (SINATI) sebenarnya merupakan sebuah koperasi yang berasal dari kumpulan atau asosiasi juragan alat tangkap purse seine. Pembentukan SINATI merupakan sebuah refleksi masa reformasi. Ketika pada masa itu (mulai 1999) ada sebuah kebebasan mendirikan sebuah organisasi, dengan tanpa memberikan batasan areal seperti pada masa pendirian KUD, maka para anggota asosiasi juragan purse seine mendirikan sebuah koperasi yang khusus ingin bergerak dalam bidang kenelayanan, atau secara lebih luas perikanan. Sebelum mendirikan koperasi SINATI, para anggota asosiasi adalah anggota dari KUD-MTS. Khasanudin *et al* (2006) melaporkan bahwa SINATI memiliki Badan Hukum pada tahun 1999.

Menurut penjelasan key informan, SINATI pernah diberi tugas untuk melakukan pengelolaan TPI, yang sebelumnya dikelola oleh KUD-MTS. Namun pengelolaan TPI ini hanya berjalan sekitar satu tahun, dan sekarang pengelolaan TPI dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang dalam hal ini di dalam pengendalian Dinas Kelautan dan Perikanan.

d. Koperasi Bakul-Nelayan (KBN)

Sejalan dengan semangat reformasi dan kemandirian usaha para pedagang ikan di kawasan Prigi mendirikan sebuah koperasi dengan nama Koperasi Bakul-Nelayan (KBN). Khasanudin *et al* (2006) melaporkan bahwa KBN didirikan pada tahun 2001, di mana pada saat berdiri memiliki anggota sejumlah 35 orang, dan sekarang telah berjumlah 124 orang. Menurunnya peran KUD-MTS dalam memberikan layanan kepada para nelayan, semakin meningkatnya kebutuhan permodalan pedagang, dan kondisi kelembagaan keuangan yang juga belum mampu memberikan layanan yang memadai, serta rendahnya akses mereka ke sektor perbankan, merupakan salah satu momentum dan energi yang kuat bagi kalangan pedagang untuk mendirikan koperasi. Hal senada juga dialami oleh para nelayan skala kecil, terutama nelayan pancing dengan mendirikan koperasi untuk nelayan skala kecil, yang akan disampaikan sebagai berikut.

e. Pantai Prigi Credit Union (PPCU).

Berdasarkan penjelasan pengelola PPCU, koperasi ini bermula dari keinginan Paguyuban Nelayan Prigi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Informasi lain menyebutkan bahwa koperasi ini merupakan kelanjutan dari cita-cita Lembaga Pengembangan Kenelayanan (LPK) yang saat ini sudah berkurang aktivitasnya. Pengelola

koperasi ini menyatakan bahwa pembentukan Credit Union didukung dan difasilitasi oleh Serikat Pelayanan Tani Nelayan-Hari Pangan Sedunia (SPTN-HPS) di Yogyakarta.

Di awal pembentukannya, PPCU memiliki jumlah anggota 34 orang yang terdiri dari berbagai macam profesi dengan simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,-. Waktu itu ada kesepakatan bahwa pendirian koperasi ini tidak terbatas pada masyarakat nelayan saja. Dengan demikian PPCU mengawali kegiatannya dengan modal sejumlah Rp.3.400.000,-. PPCU menggunakan semboyan sebagai *The Real Cooperative*, dengan tekad menjadi koperasi yang sebenar-benarnya. Visi PPCU adalah: “Terwujudnya Kesejahteraan Anggota”, dengan misi: “Menjadi lembaga yang kokoh, terpercaya, didukung oleh moralitas dan mentalitas SDM yang bagus, bersama-sama membangun tanggungjawab sosial masyarakat (CSR).

Berdasarkan dokumen Akta Pendirian Koperasi, PPCU telah berbadan hukum sejak tanggal 4 September 2003. Dalam Bab I Pasal 1 Anggaran Dasar disebutkan bahwa koperasi ini merupakan Koperasi Serba Usaha “Pantai Prigi Credit Union” (KSU-PPCU), dalam laporan ini hanya diebut sebagai PPCU saja.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam Rapat Anggota Tahunan Ke-4 (RAT-4) dilaporkan bahwa keanggotaan saat ini terdiri dari 134 pria dan 150 orang wanita. Dari jumlah tersebut delapan orang menyatakan keluar dari keanggotaan, sehingga anggota aktif berjumlah 276 orang. Total modal sendiri sampai dengan tahun 2006 adalah Rp. 129.482.603,- dan modal hutang sejumlah Rp. 1.200.767.270,-. Sisa Hasil Usaha PPCU mengalami peningkatan, di mana jika pada wal berdiri hanya memiliki SHU Rp. 700.200,- (2002), pada tahun 2006 mencapai Rp. 108.066.209,-. Di dalam laporan RAT PPCU juga menyertakan Rencana Kerja untuk tahun 2007 baik pada tingkat pengurus maupun pengawas.

5.5.2.3. Perseorangan.

Lembaga keuangan perseorangan dalam masyarakat pedesaan pantai adalah merupakan kelaziman. Dalam struktur masyarakat pedesaan peranan elit ekonomi ini sangat penting di dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat nelayan. Peranan pedagang sebagai lembaga keuangan perseorangan di Prigi semakin meningkat dengan adanya kebutuhan rumpon laut dalam sebagai alat bantu dalam penangkapan ikan di lepas pantai. Identifikasi awal studi ini diperoleh informasi bahwa saat ini ada sejumlah sembilan (9) orang pedagang yang memberikan pinjaman kepada nelayan.

Para pedagang ini memberikan pinjaman kepada 43 orang nelayan juragan. Pinjaman diberikan dalam bentuk barang (rumpon, gen set, lampu dan peralatan lainnya). Pembayaran dilakukan dengan angsuran pada setiap memperoleh hasil penangkapan ikan. Seluruh hasil tangkap yang diperoleh dijual kepada pedagang yang memberikan pinjaman. Gambaran umum kredit perseorangan yang ada di Prigi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4. Performance Lembaga Keuangan Perseorangan yang berkaitan dengan "kredit" Rumpon Laut Dalam.

No	Kode Pemilik	Jumlah Rumpon (unit)	Bentuk pinjaman	Sistem Pembayaran	Hambatan dalam sistem
1	GNW/SRT	20	Tali, pemberat dan pelampung	10 % dari pendapatan kotor	1. ada keengganan nelayan ke rumpon 2. rumpon hilang
2	ABS	28	Tali, pemberat dan pelampung	10 % dari pendapatan kotor	1. ada keengganan nelayan ke rumpon
3	AMM	7	Tali, pemberat dan pelampung	10 % dari pendapatan kotor	1. ada keengganan nelayan ke rumpon 2. rumpon hilang.
4	ST/M	5	Tali, pemberat dan pelampung	10 % dari pendapatan kotor	1. rumpon hilang.

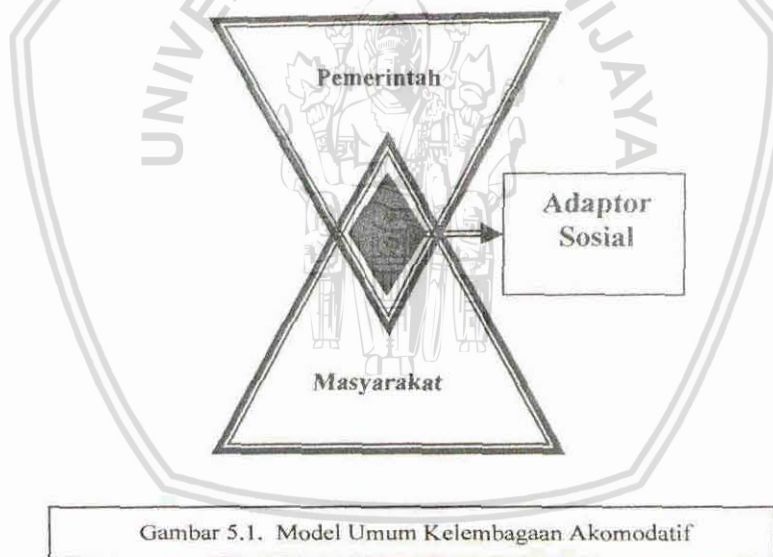
Alasan dan pengalaman nelayan menggunakan rumpon di dalam melakukan usaha penangkapan adalah sebagai berikut. Nelayan A, memberikan informasi sebagai berikut. Alasan menggunakan rumpon untuk meningkatkan hasil tangkapan dan mempermudah menemukan daerah penangkapan. Secara nyata dialami oleh nelayan bahwa kerja mereka lebih efisien penggunaan BBM, karena daerah penangkapan sudah tertentu, mereka tidak harus mencari dan mengejar gerombolan ikan. Kerugian yang dirasakan adalah: (1) memerlukan waktu yang lebih lama, bisa lebih dari 24 jam, (2) nelayan tetap membayar pinjaman ketika rumpon yang disediakan oleh pedagang hilang, (3) Pemilik rumpon mengurangi harga jual hasil tangkapan, misalnya jika harga ikan Rp.6.000,- per kg, maka dipotong sejumlah Rp.500,- sampai Rp. 1.000,- per kg. (4) Nelayan tidak memiliki posisi tawar yang kuat terhadap pemberi pinjaman rumpon. (5) Pembayaran yang dilakukan oleh pemilik rumpon belum lancar.

4.6. Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pendekatan model pemberdayaan masyarakat pesisir dalam riset ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan mikro yang tidak terlalu merugikan mereka. Rancangan model pemberdayaan yang akan dikembangkan adalah dengan mendasarkan kepada tiga hal. *Pertama*, menggunakan pendekatan kelembagaan akomodatif sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Susilo *et al* (1996-1998). *Kedua*, analisis peluang dikembangkannya sebuah Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana yang disampaikan oleh Khasanudin *et al* (2006). *Ketiga*, kondisi lapang saat penelitian tahap pertama ini dilaksanakan.

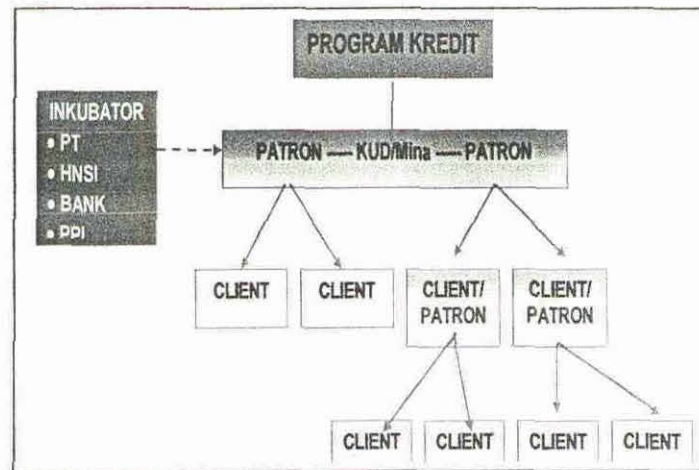
Rencana peningkatan akses dilakukan dengan mensintesakan kelembagaan akomodatif dengan rancangan BPR, yang secara rinci adalah sebagai berikut.

- (1) Model Kelembagaan Akomodatif yang dikembangkan oleh Susilo *et al.* (1996-1998) adalah sebagai berikut: (1) Model Umum, yang menjelaskan bahwa item pembangunan dari pemerintah memerlukan sebuah lembaga antara (adaptor sosial) untuk menyambungkan dengan kebutuhan dan kondisi lokal atau lapang (Gambar 5.1.)



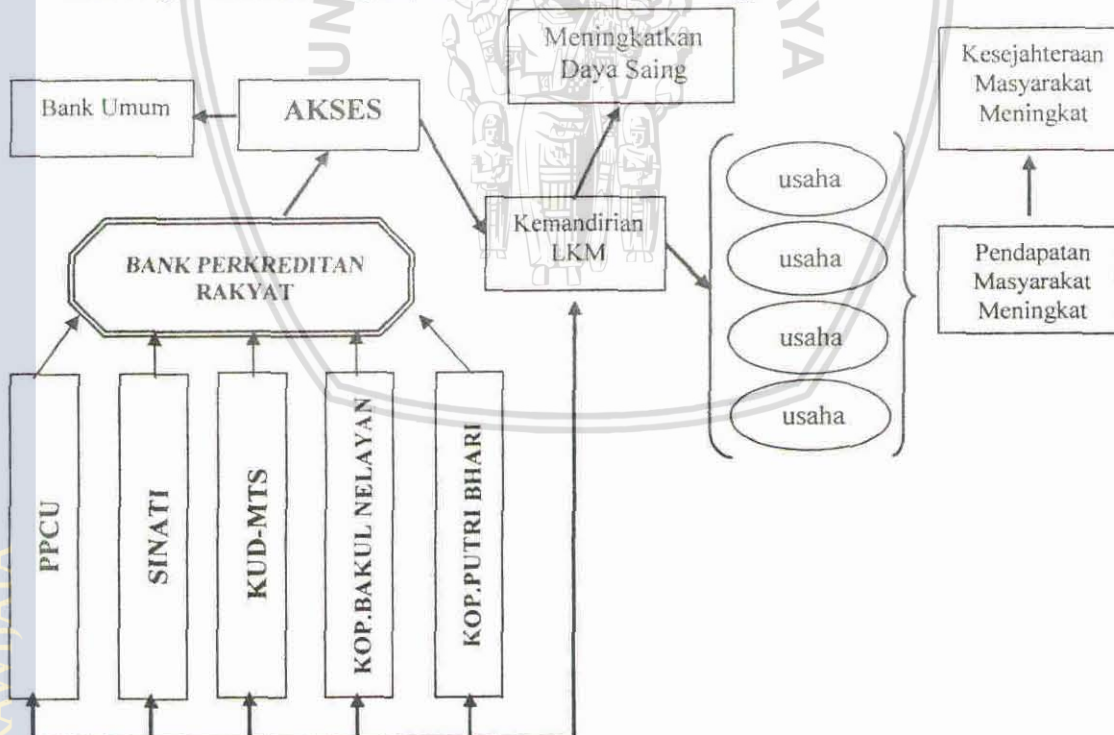
Gambar 5.1. Model Umum Kelembagaan Akomodatif

- (2) Model operasional, yang secara operasional dalam kasus pengembangan kelembagaan keuangan melalui Unit Simpan Pinjam (USP) di Koperasi Unit Desa Mina, harus diintegrasikan dengan sistem kelembagaan lokal keuangan yang ada, yang secara umum dalam masyarakat perikanan saat ini berkembang kelembagaan *patron-client* (Gambar 5.2.).



Gambar 5.2. Model Operasional Kelembagaan Akomodatif

- (3) Rancangan pembentukan BPR menurut Khasanudin *et al.* (2006) divisualisasikan sebagaimana pada Gambar 5.3. Khasanudin menjelaskan bahwa pembentukan BPR ini tidak secara otomatis lembaga keuangan mikro akan melebur menjadi satu. Akan tetapi lembaga keuangan tersebut menjadi pemegang saham dari BPR yang ada, atau dengan kata lain BPR akan menjadi payung hukum dari lembaga keuangan yang ada dan bergerak sesuai dengan pangsa pasar masing-masing.



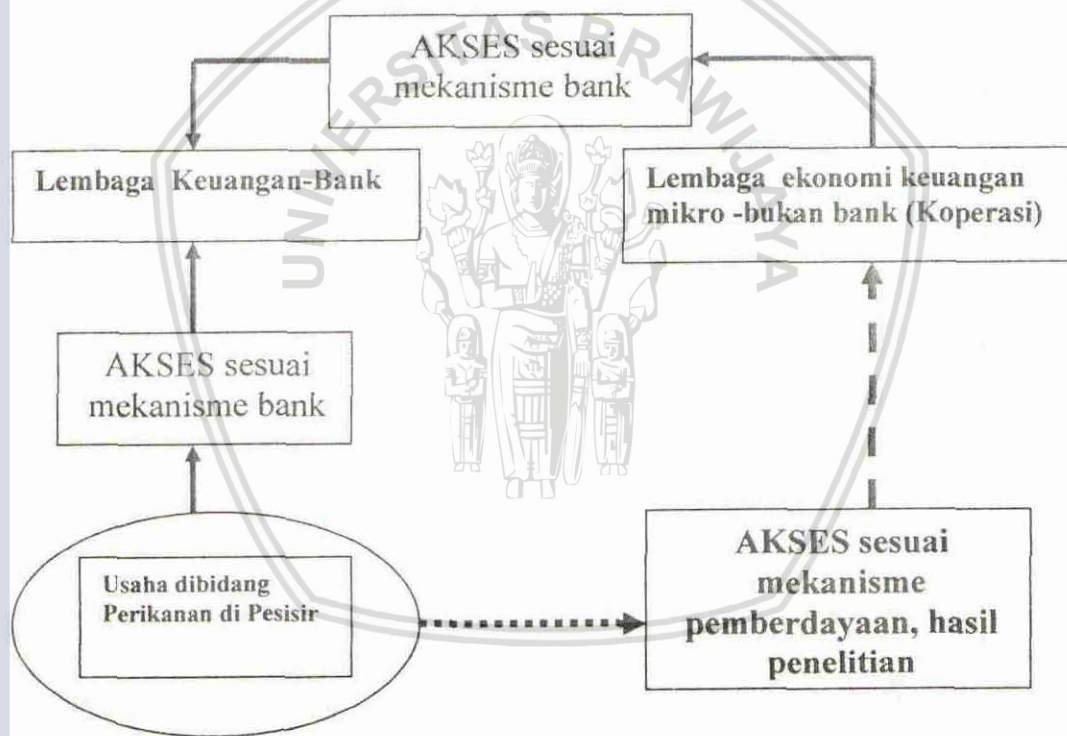
Gambar 5.3. Model BPR (Jaringan Kerjasama antar Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir)

(4) Lembaga ekonomi keuangan yang akan dikembangkan ke depan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan, mempunyai beberapa komponen pokok, yaitu:

a. Falsafah Pengelolaan Lembaga Keuangan:

- Kemampuan akses : Kelembagaan ekonomi keuangan tersebut mampu mengakses langsung kepada penyedia modal dari Bank Umum, yaitu BRI dan Bank Jatim.
- Meminimalkan dampak : Lembaga ekonomi keuangan yang direncanakan tidak berdampak negatif terhadap lembaga keuangan mikro yang ada.
- Lembaga Antara : Peran sebagai lembaga antara mampu menjadi penghubung dan penjamin bagi lembaga bank yang sudah ada, dan lembaga tersebut memiliki akuntabilitas/ kelayakan perbankan.

b. Model pengembangan kelembagaan ekonomi keuangan mikro dan mekanisme kerja kelembagaan dihipotesiskan seperti gambar 5.4, pengembangan model pemberdayaan akan diteliti pada penelitian PHB tahun II



Gambar 5.4. Model jejaring pemberdayaan kelembagaan ekonomi keuangan mikro

Keterangan :

-----> : Alur yang diduga akan dapat lebih memberdayakan peran lembaga ekonomi keuangan mikro

Model yang ada pada gambar 5.4 menunjukkan bahwa sesuai dengan mekanisme standart per bank angsuran pinjaman kepada bank adalah *flat* dalam arti bahwa angsuran dibayar dalam jumlah tetap setiap bulan sesuai perhitungan bank yang disetujui *debitur* (nasabah). Mekanisme ini mungkin cocok untuk perusahaan yang *generating income* nya relatif tidak berfluktuasi besar atau pegawai negeri yang pendapatannya relatif konstan. Bagi nelayan mekanisme pembayaran seperti ini diduga akan mnjadi beban yang berat bagi nelayan karena pendapatan nelayan sangat besar fluktuasinya, disaat musim ikan pendapatan yang diterima sangat besar, dimusim sedang mungkin masih bisa mengangsur, akan tetapi saat musim paceklik (*laif*) jangankan untuk mengangsur untuk makan sehari-hari saja susah. Walaupun di Pantai Prigi musim paceklik ini masih bisa memperoleh ikan karena ada rumpon, tetapi untuk mengangsur hutang tidaklah mencukupi. Oleh karena itu dirasa perlu dibuat model hipotesis di atas dalam memberdayakan lembaga keuangan-ekonomi mikro yang ada di Prigi.

Model hipotesis yang dibuat adalah dengan membuat lembaga keuangan-ekonomi mikro yang ada menjadi *buffer* (penyangga) yang berperan dalam pendistribusian angsuran dari nelayan. Dengan adanya lembaga penyangga tersebut nelayan dapat mengangsur hutangnya secara proporsional, dalam arti saat musim puncak diangsur besar (angsuran saat itu ditambah angsuran nanti saat paceklik), saat musim sedang diangsur normal, dan saat tidak musim tidak perlu mengangsur.

Dengan mekanisme semacam ini perbankan tetap memperoleh angsuran sesuai mekanismenya yaitu *flat* setiap bulan, nelayan masih bisa mengangsur, akan tetapi yang perlu dikaji adalah manfaat apa yang bisa diperoleh dari lembaga keuangan-ekonomi mikro sebagai penyangga tersebut?. Hal inilah yang menjadi salah satu kajian riset pada tahun kedua nantinya.

0800486

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan sementara pada Laporan Kemajuan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Kawasan pesisir Pantai Prigi telah mengalami berbagai perubahan, baik pada perubahan kondisi fisik wilayah, maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berbagai perubahan usaha penangkapan ikan berkembang sesuai dengan kondisi perubahan sumberdaya, maupun kemampuan teknologi yang dikuasai oleh nelayan, terutama untuk mengakses sumberdaya di lepas pantai dengan penggunaan alat bantu rumpon laut dalam. Selain sebagai nelayan masyarakat pesisir berusaha dibidang pengolahan, dan perdagangan yang relatif tidak mengalami perubahan dalam usaha.
- (2) Perubahan sasaran usaha penangkapan ikan mengarah kepada jenis-jenis ikan ekonomis penting yang berorientasi ekspor, seperti ikan tuna dan layur, telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor ini. Peran usaha perikanan terhadap PAD mengalami peningkatan yang signifikan pada 5 tahun terakhir yaitu sekitar Rp.100.000.000 pada tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 310.000.000 pada tahun 2006
- (3) Kelembagaan keuangan yang ada mengalami pertumbuhan, terutama pada dikembangkannya kelembagaan baik melalui program pemerintah, maupun atas inisiatif masyarakat itu sendiri.
- (4) Model pengembangan kelembagaan ekonomi dan keuangan didasarkan pada temuan model yang diduga dapat lebih memberdayakan akses permodalan nelayan melalui pembayaran proporsional sesuai musim ikan.

6.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah diperlukannya sebuah riset aksi untuk membentuk kelembagaan ekonomi keuangan mikro "baru" yang lebih operasional dan mampu meningkatkan aksesibilitasnya terhadap perbankan di satu sisi, dan di sisi lain mampu meningkatkan aksesibilitas nelayan di dalam memenuhi kebutuhan permodalan dalam menjalankan usahanya. Riset aksi dimaksud akan memfasilitasi terbentuknya lembaga ekonomi keuangan mikro, bentuk organisasi kelembagaan keuangan, mekanisme kerja kelembagaan, dan akses awal kepada lembaga perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- repository.ub.ac.id
- Anonymous, 1998. **Skim Kredit untuk Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.** Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam. Jakarta.
- Ashar, K., Toyib, A. Susilo, Sudamar, H,W dan Malik, 1995. **Dinamika Tenaga Kerja Pedesaan (Studi Kasus di Magetan Selatan)**, dalam Review hasil-hasil Penelitian dalam rangka implementasi PIP Universitas Brawijaya Tahun 1990/1991 – 1993/1994. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, Malang.
- Dahuri, 1993. **Model Pembangunan Sumberdaya Perikanan Secara Berkelanjutan.** Simposium Perikanan Indonesia I, Jakarta 25 – 27 Agustus 1993.
- Dahuri, R., Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M.J. Sitepu, 1996. **Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.** Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 298 hal.
- Dahuri, Rokhmin dan Achmad Fahrudin. 1996. **Teknik Valuasi Ekonomi Sumber Daya Pesisir dan Lautan.** Makalah pada kursus pengelolaan wilayah pesisir dan laut, LP-ITS dengan proyek pengembangan pusat studi lingkungan Ditjen di Surabaya, 2 - 11 Januari 1997.
- Dahuri, 1997. **Pengelolaan Kawasan Laut dan Pesisir Secara Terpadu di Indonesia.** Makalah kursus pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Pusat penelitian kependudukan dan Lingkungan Hidup, LP-ITS Surabaya dengan PPPSL, Surabaya 2–11 Januari 1997.
- Dahuri, Rokhmin, Jacob R, Sapta P G, M J Sitepu, 2001. **Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu.** Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fauzi, Akhmad. 2004. **Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.** PT Gramedia Pustaka Tama. Jakarta.
- Gulland, J.A., 1983. *The Management of Marine Fisheries Scientecnicha (pub)*, Bristol.
- Harahap, Nuddin, 1993. **Kekuatan Tradisi dalam Sistem Bagi Hasil dan Analisis Profitabilitas Usaha Penangkapan Ikan di Jawa Timur**, The Toyota Foundation.
- Harahap, Nuddin, 1998. **Analisis Faktor Produksi Dan Distribusi Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Di Sendang Biru Kabupaten Malang.** Dana proyek pengkajian dan penelitian ilmu terapan DIKTI, Fakultas Perikanan Unibraw, Malang.
- Harahap, Nuddin; M. Musa, M, Mahmudi., 2000. **Studi Perencanaan Kawasan Pesisir dan Kelautan Kabupaten Malang.** Bappeda Kabupaten Malang.

- Khasanudin, A.Qoid dan E. Susilo. 2006. Profil dan Peran Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Kawasan Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek). Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Tidak diterbitkan.
- Nybaken, J.W. 1982. *Marine Biology: An Ecological Approuach*. Copy Right 1982 by James W. Nybaken All Rights Rewvud.
- Panayotou, T. 1982. *Management for Small Scale Fisheries Economic and Social Aspect FAO Fish*. Teknical Paper No. 228 , Rome.
- Purwanti, Pudji, 1996. **Curahan Waktu dan Produktivitas Kerja Masyarakat Nelayan di Pedesaan Pantai Kabupaten Pasuruan**. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, Malang.
- Riniwati, Harsuko, 1995. **Pengaruh Kredit Informal Pada Usaha Penangkapan terhadap Produksi dan Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di Lekok Jawa Timur**.
- Riniwati, Harsuko, 1997. **Identifikasi Beberapa Aspek Penentu Dalam Pengembangan Usaha Pengolahan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur**. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, Malang.
- Siagian, H. 1986. **Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa**. Penerbit Rajawali. Jakarta.
- Smith, FJ. 1975. *The Fishermen's Busines Guide International Marine Publishing Co*. Camdem, Marine.
- Suparmoko, 1995. **Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (suatu pendekatan teoritis)**. Edisi II. BPFE Yogyakarta.
- Supriharyono. 2000. **Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Susrini, Maryani, E.F., dan Riniwati, H., 1997. **Kedudukan dan Peran Wanita Tani Nelayan di Kabupaten Dati II Tulungagung**. Pusat Penelitian Peran wanita , Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya.
- Susilo, E., K. Hidayat, S.B. Siswijono, B.S. Haryono dan Ismadi. 1996-1998. **Model Kelembagaan Akomodatif Sebagai Upaya Mewujudkan Struktur Masyarakat Agribisnis "Progresif Integratif" Guna Menunjang Pembangunan Wilayah Pedesaan Pantai Jawa Timur**. Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Pusat Penelitian Ilmu Sosial Universitas Brawijaya, Malang.
- Tjahjono, Agus, dkk, 1999. **Identifikasi Keperluan Usaha Ekonomi dalam Rangka Mengahapus Kemiskinan**. ADB-Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.

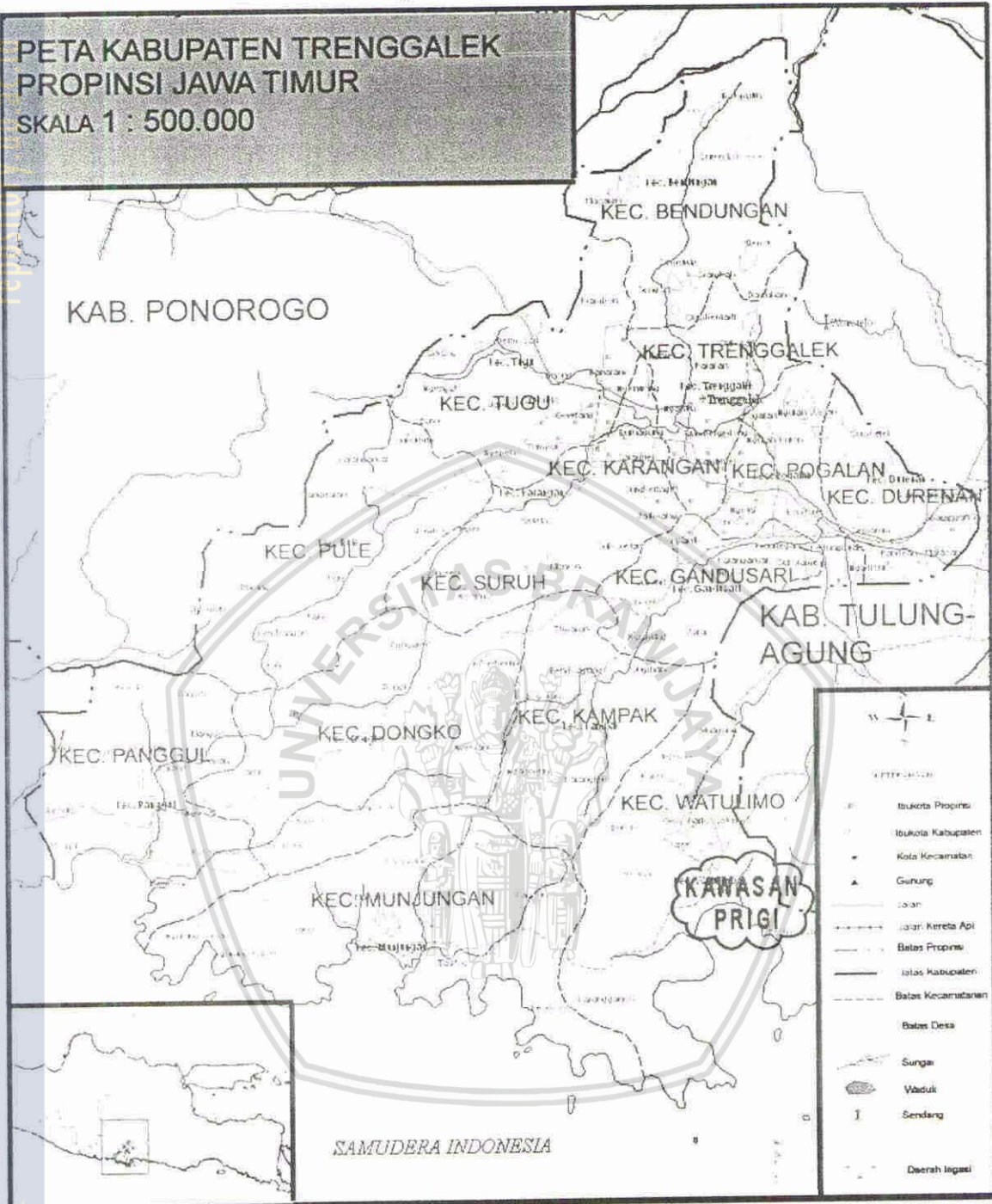
Tjahjono, Agus, dkk, 2004. **Social Economics Acessment (SEA II)**. ADB-Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM). Universitas Brawijaya. Malang.

Wahyuningsih, 1995. **Perlindungan Hukum Bagi Wanita Pekerja Informal di Dati II Kabupaten Lumajang**. Pusat Penelitian Peran Wanita Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, MaLang.

Tempo, 2007. Semarak Indonesia Membangun: Edisi Khusus Kemerdekaan Indonesia. Majalah Berita Mingguan. Edisi-1. 13-19 Agustus 2007.

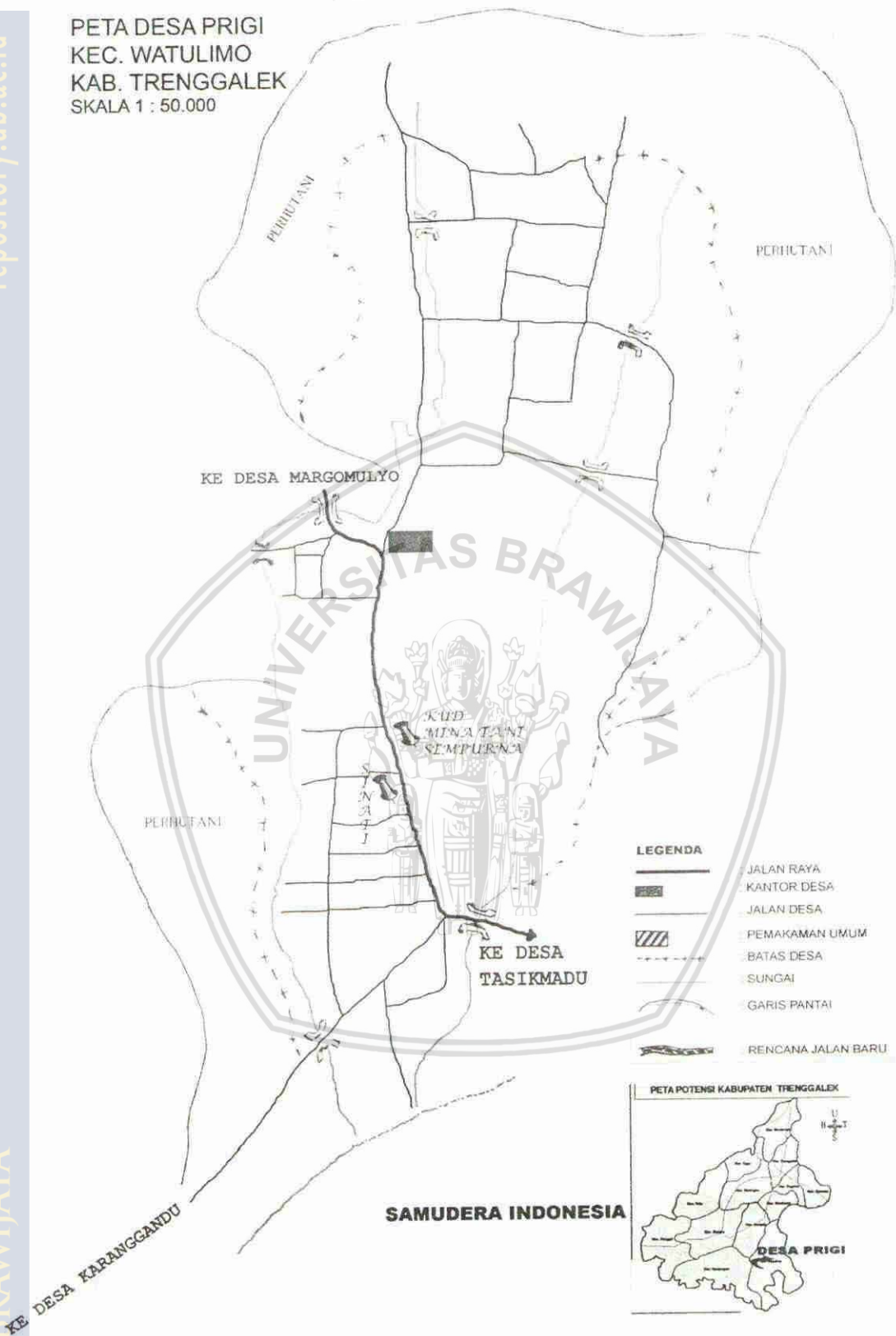


PETA KABUPATEN TRENGGALEK
PROPINSI JAWA TIMUR
SKALA 1 : 500.000



prigi bos (2338x3500x24b psd)

PETA DESA PRIGI
KEC. WATULIMO
KAB. TRENGGALEK
SKALA 1 : 50.000



PETA DESA TASIKMADU
KEC. WATULIMO
KAB. TRENGGALEK
SKALA 1 : 50.000

